



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

**BIRO HUBUNGAN
MASYARAKAT
DAN KERJA SAMA
LUAR NEGERI**

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja tahun 2023 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN). Kami juga turut berterima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan Kelautan dan Perikanan (KKP) atas arahan dan bimbingan selama ini dalam penyusunan dan penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) ini.

Pada tahun anggaran 2023, kinerja BHKLN selain dilaporkan secara triwulanan juga secara tahunan sebagai akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah diberikan dan dipercayakan. LKj ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) untuk tahun 2023 serta analisis dan rencana tindak lanjut pada periode berikutnya.

Di tahun ini, BHKLN mengemban 3 sasaran kegiatan yang dikonkretkan ke dalam 19 Indikator Kinerja (IK) yang menjadi tanggung jawab BHKLN di tahun 2023 hasil proses *cascading* Indikator Kinerja Kegiatan Sekretaris Jenderal.

Penyusunan LKj BHKLN tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyadari LKj ini masih jauh dari sempurna, untuk itu koreksi dan saran yang membangun dari setiap pembaca kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 20 Januari 2024
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ari Prabowo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
1.3. Isu Strategis	5
1.4. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1. Rencana Strategis Setjen	7
2.2. Rencana Kerja BHKLN Tahun 2023	7
2.3. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023	8
2.4. Monitoring dan Pengukuran Kinerja	12
2.5. Pemanfaatan Informasi Pada Kinerja Tahun 2022	13
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Kinerja Organisasi	15
IK 1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik.....	19
IK 2 Nilai Dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik.....	21
IK 3 Nilai keterbukaan informasi publik	22
IK 4 Nilai komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab BHKLN.....	29
IK 5 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	30
IK 6 Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP.....	34
IK 7 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	37
IK 8 Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan kkp.....	41
IK 9 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	44

IK 10 Persentase kepemimpinan indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	50
IK 11 Indeks profesionalitas ASN BHKLN	52
IK 12 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BHKLN	56
IK 13 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BHKLN	58
IK 14 Nilai penilaian mandiri SAKIP BHKLN.....	60
IK 15 Persentase penyerapan anggaran BHKLN.....	63
IK 16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	64
IK 17 Persentase unit kerja BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.....	65
IK 18 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	67
IK 19 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan BHKLN	69
3.2. Kinerja Anggaran	72
3.3. Kinerja Lainnya.....	72
3.4. Efisiensi Sumber Daya	75
BAB 4 PENUTUP	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Rekomendasi Perbaikan.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Setjen.....	2
Gambar 2 Perubahan Struktur BHKLN.....	2
Gambar 3 Struktur BHKLN.....	3
Gambar 4 SDM BHKLN Berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Gambar 5 SDM BHKLN Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	4
Gambar 6 SDM BHKLN Berdasarkan Status Kepegawaian.....	4
Gambar 7 Demografi BHKLN.....	5
Gambar 8 Tangkapan Layar NKO BHKLN Tahun 2023 Pada Aplikasi Kinerjaku.....	16
Gambar 9 Tangkapan Layar Capaian Indikator Kinerja BHKLN Tahun 2023 Pada Aplikasi Kinerjaku.....	17
Gambar 10 Capaian NKO BHKLN Tahun 2018 - 2023.....	18
Gambar 11 Tahapan Monev KIP Tahun 2023.....	23
Gambar 12 Kegiatan Workshop Petunjuk Pengisian Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Lingkup KKP.....	24
Gambar 13 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kepada KKP Diwakili oleh Inspektur Jenderal KKP, 19 Desember 2023 di Istana Wakil Presiden RI.....	28
Gambar 14 Penyampaian Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Inspektur Jenderal KKP Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.....	28
Gambar 15 Pemberian Penghargaan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.....	30
Gambar 16 Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kalimantan Timur, 12 Desember 2023..	33
Gambar 17 Rapat Kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI, 14 November 2023.....	33
Gambar 18 Forum Komunikasi Perpustakaan Khusus di Lingkungan KKP, 22 – 23 Agustus 2023 secara hybrid di Archipelago Indonesia Marine Library ..	36
Gambar 19 Menteri Kelautan dan Perikanan Bersama Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Melakukan High-Level Meeting Dengan Delegasi China Association for Sciences and Technologi (CAST) di Kantor Pusat KKP, 21 November 2023.....	41
Gambar 20 The 4 th MoP PSMA di Bali, 8-12 Mei 2023.....	49
Gambar 21 Kepala BHKLN Memberikan Keynote Speech pada APEC Workshop on Fisheries Enforcement Strategies to Prevent Combat and Deter IUUF Related to Covid-19 pandemic di Banten, 15 November 2023.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 SDM BHKLN Tahun 2023.....	4
Tabel 2 Perubahan PK BHKLN Tahun 2023	11
Tabel 3 Daftar IK BHKLN Tahun 2023.....	12
Tabel 4 Pemanfaatan Kinerja BHKLN Tahun 2022.....	14
Tabel 5 Realisasi dan Capaian Kinerja BHKLN 2023.....	16
Tabel 6 Rincian Capaian IK Nilai Dimensi Input Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	19
Tabel 7 Skor Indeks PIKP Dimensi Input Kategori K/L Non Kementerian Tahun 2022	20
Tabel 8 Rincian Capaian IK Nilai Dimensi Proses Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	21
Tabel 9 Skor Indeks PIKP Dimensi Input Kategori K/L Non Kementerian Tahun 2022	21
Tabel 10 Bobot Penilaian Terhadap Aspek-Aspek Standar Layanan Informasi	26
Tabel 11 Rincian Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik	27
Tabel 12 Hasil Monitoring dan Evaluasi KIP Pada Badan Publik Tahun 2023.....	27
Tabel 13 Rincian Capaian IK Nilai Komponen RB KKP yang Menjadi Tanggung Jawab BHKLN	29
Tabel 14 Jenis Kuesioner dan Responden Kuesioner Terhadap IK Persentase Efektifitas Layanan Hubungan Lembaga Kepada Mitra Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.....	31
Tabel 15 Rincian Capaian IK Persentase Efektifitas Layanan Hubungan Lembaga Kepada Mitra Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan	31
Tabel 16 Tingkat Efektifitas Layanan Hubungan Lembaga.....	33
Tabel 17 Rincian Capaian IK Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP	35
Tabel 18 Tabulasi Perhitungan Nilai SKM Perpustakaan KKP Tahun 2023.....	35
Tabel 19 Konversi Nilai SKM Pelayanan Publik.....	36
Tabel 20 Rincian Capaian IK Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Ditindaklanjuti.....	38
Tabel 21 Persentase Capaian Kinerja Kerja Sama Bilateral per Kawasan Tahun 2023	38
Tabel 22 Bentuk Kegiatan Kerja Sama Bilateral yang Ditindaklanjuti Tahun 2023 ...	40
Tabel 23 Rincian Capaian IK Persentase Kepuasan Terhadap Layanan PDLN di Lingkungan KKP	42
Tabel 24 Tingkat Kepuasan Layanan PDLN di Lingkungan KKP.....	44
Tabel 25 Rincian Capaian IK Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diterima di Forum Internasional.....	46
Tabel 26 Persentase Capaian Kinerja Kerja Sama Regional dan Multilateral per Kawasan Tahun 2023	46

Tabel 27 Posisi/Rekomendasi/Prakarsa di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diterima di Forum Internasional Tahun 2023	49
Tabel 28 Rincian Capaian IK Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Regional dan Multilateral di bidang Kelautan dan Perikanan	50
Tabel 29 Rincian Capaian IK IP ASN BHKLN	54
Tabel 30 Capaian IK IP ASN Lingkup Setjen	55
Tabel 31 Rincian Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BHKLN	57
Tabel 32 Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Setjen	57
Tabel 33 Rincian Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BHKLN.....	59
Tabel 34 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen	59
Tabel 35 Rincian Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BHKLN	60
Tabel 36 Bobot Penilaian Mandiri SAKIP	61
Tabel 37 Capaian IK Nilai PM SAKIP Lingkup Setjen	61
Tabel 38 Kategori Penilaian SAKIP	62
Tabel 39 Rincian Capaian IK Persentase Penyerapan Anggaran BHKLN.....	63
Tabel 40 Capaian IK Persentase Penyerapan Anggaran Lingkup Setjen	63
Tabel 41 Rincian Capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.....	64
Tabel 42 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup KKP	65
Tabel 43 Rincian Capaian IK Persentase Unit Kerja BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	66
Tabel 44 Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen	67
Tabel 45 Rincian Capaian IK Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	68
Tabel 46 Capaian IK Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Setjen.....	69
Tabel 47 Capaian IK Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan BHKLN.....	70
Tabel 48 Capaian IK Inovasi Pelayanan Publik di Lingkup KKP	70
Tabel 49 Capaian Nilai Efisiensi BHKLN Tahun 2023	75
Tabel 50 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Tahun 2024	79

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKj tahun 2023 BHKLN memuat target, realisasi, capaian serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sepanjang tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal (Setjen) dan pada tahun ini, BHKLN telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra tersebut.

Terdapat 3 sasaran kegiatan yang menjadi target di tahun 2023, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik, tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kerja sama internasional, dan terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BHKLN. Ketiga sasaran kegiatan ini kemudian ditetapkan melalui PK yang memuat 19 IK.

Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengukuran oleh aplikasi Kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) nilai kinerja BHKLN pada tahun 2023 sebesar 106,13. Dari 19 IK BHKLN tersebut, seluruh IK telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian seluruh IK tersebut, sebagai berikut.

1. Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik, target 89,36 dan capaian sebesar 89,36 (persentase capaian 100%).
2. Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik, target 85,25 dan capaian sebesar 85,25 (persentase capaian 100%).
3. Nilai keterbukaan informasi publik, target 91 dan capaian sebesar 94,51 (persentase capaian 103,86%).
4. Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan KLN, target 3,7 dan capaian sebesar 3,92 (persentase capaian sebesar 105,95%).
5. Persentase efektivitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan, target 80 dan capaian sebesar 92,26 (persentase capaian sebesar 115,33%).
6. Nilai kepuasan terhadap layanan perpustakaan KKP, target 80 dan capaian sebesar 88,48 (persentase capaian sebesar 110,60%).
7. Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti, target 90 dan capaian sebesar 100 (persentase capaian sebesar 111,11%).
8. Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP, target 85 dan capaian sebesar 87,45 (persentase capaian sebesar 102,88%).
9. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional, target 92 dan capaian sebesar 100 (persentase capaian sebesar 108,70%).

10. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral bidang kelautan dan perikanan, target 92 dan capaian sebesar 100 (persentase capaian sebesar 108,70%).
11. Indeks profesionalitas ASN BHKLN, target 79 dan capaian sebesar 84,45 (persentase capaian sebesar 106,90%).
12. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BHKLN, target 100 dan capaian sebesar 100 (persentase capaian sebesar 100%).
13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BHKLN, target 75 dan capaian sebesar 75 (persentase capaian sebesar 100%).
14. Nilai penilaian mandiri SAKIP BHKLN, target 80,5 dan capaian sebesar 83,30 (persentase capaian sebesar 103,48%).
15. Persentase penyerapan anggaran BHKLN, target 95 dan capaian sebesar 99,55 (persentase capaian sebesar 104,79%).
16. Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri, target 100 dan capaian sebesar 100 (persentase capaian sebesar 100%).
17. Persentase unit kerja BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, target 92 dan capaian sebesar 133,33 (persentase capaian sebesar 120%).
18. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi, target 75 dan capaian sebesar 81,34 (persentase capaian sebesar 108,45%).
19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan BHKLN, target 1 dan capaian sebesar 1 (persentase capaian sebesar 100%).

Kinerja Anggaran

Pada tahun 2023 terdapat sebanyak dua kali refocusing anggaran di BHKLN sehingga anggaran yang semula sebesar Rp 36.235.315.000 menjadi Rp 24.281.262.000. Adapun realisasi anggaran BHKLN pada tahun 2023 sebesar Rp 24.125.714.981 atau sebesar 99,36% dari pagu anggaran setelah refocusing.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

LKj BHKLN tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama tahun 2023 (tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2023). Selain memuat pencapaian kinerja, LKj BHKLN tahun 2023 juga memuat pertanggungjawaban atas realisasi anggaran yang telah digunakan. Penyusunan LKj ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BHKLN dalam rangka meningkatkan kinerja.

Adapun progres dan pengumpulan capaian kinerja dilakukan secara berkala oleh seluruh unit kerja lingkup BHKLN dengan cara menyampaikan pencapaian IK yang menjadi tanggung jawab unit setiap triwulan kepada pengelola kinerja BHKLN. Selanjutnya, pengelola kinerja melaporkan pencapaian kepada Biro Perencanaan dan Sekretaris Jenderal KKP melalui sistem informasi, yaitu aplikasi Kinerjaku. Pembahasan atas realisasi dan capaian kinerja triwulanan dan tahunan juga dilakukan oleh dengan pimpinan unit kerja di BHKLN sembari berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Ketua dan Anggota Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2023.

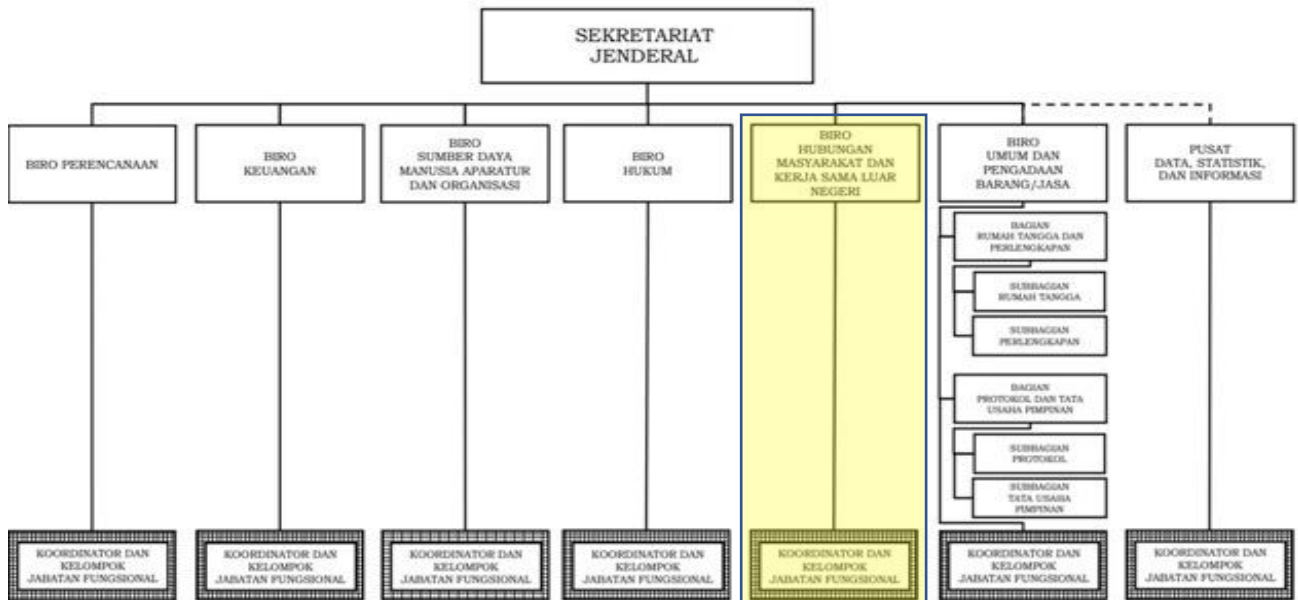
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BHKLN merupakan salah satu unit organisasi yang terdapat di Setjen dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi BHKLN terdiri atas Kepala BHKLN dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas BHKLN adalah untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaannya menyelenggarakan fungsi:

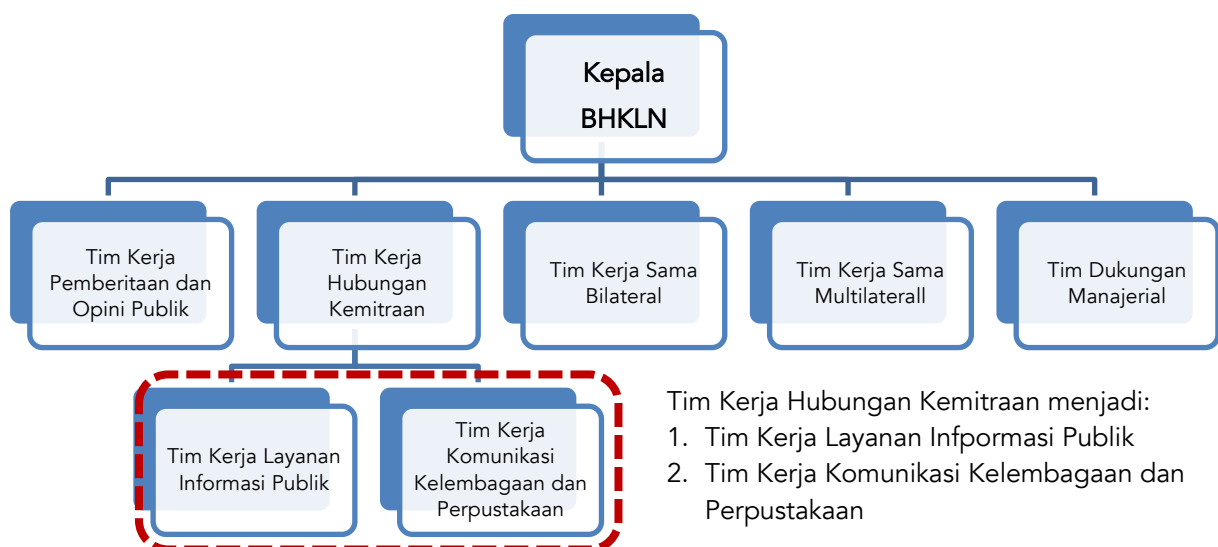
- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan;

- c. koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.



Gambar 1 Struktur Organisasi Setjen

Sebagai tindak lanjut atas implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan struktur di BHKLN. Semula Tim Kerja di BHKLN sebanyak 5 Tim Kerja menjadi 6 Tim Kerja. Adapun rincian perubahannya sebagai berikut.



Gambar 2 Perubahan Struktur BHKLN

Sehingga struktur BHKLN adalah sebagai berikut.



Gambar 3 Struktur BHKLN

Pada tahun 2023 terdapat beberapa kali perubahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) BHKLN. Perubahan tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- Pegawai pensiun sebanyak 2 pegawai;
- Pegawai yang diterima di unit kerja lain melalui proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 5 pegawai;
- Pegawai yang diterima sebagai PPPK di BHKLN sebanyak 1 pegawai; dan
- Pegawai yang mutasi di tempat kerja lain sebanyak 1 pegawai.

Hingga akhir tahun 2023 SDM BHKLN berjumlah 76 pegawai dengan rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Substansi/Kelompok Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kepala BHKLN	1
2	Tim Kerja Pemberitaan dan Opini Publik	28
3	Tim Kerja Layanan Informasi Publik	6

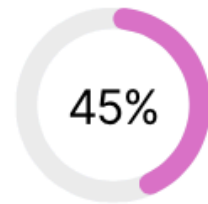
No	Substansi/Kelompok Kerja	Jumlah Pegawai
4	Tim Kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	8
5	Tim Kerja Sama Bilateral	7
6	Tim Kerja Sama Multilateral	9
7	Tim Kerja Dukungan Manajerial	16
8	Diperbantukan	1
Jumlah		76

Tabel 1 SDM BHKLN Tahun 2023

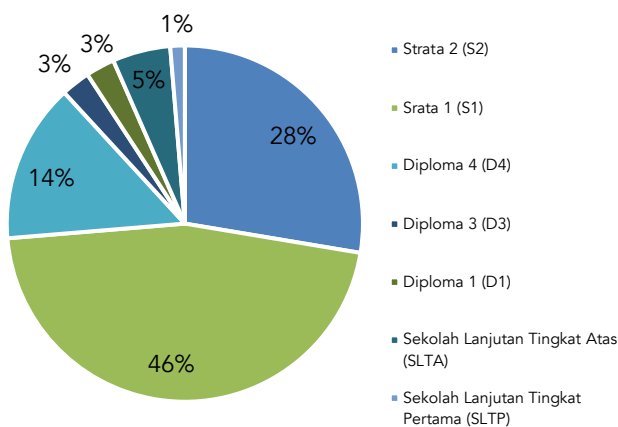
Sebanyak 42 pegawai berjenis kelamin laki-laki



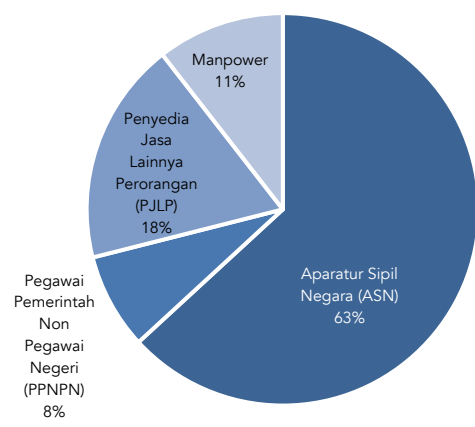
Sebanyak 34 pegawai berjenis kelamin perempuan



Gambar 4 SDM BHKLN Berdasarkan Jenis Kelamin

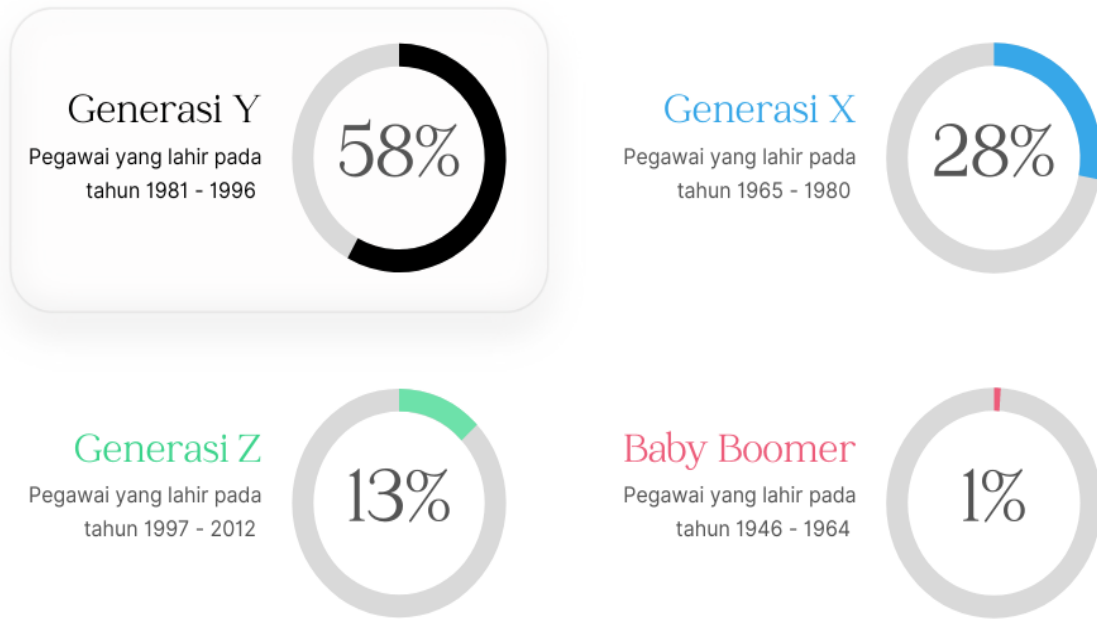


Gambar 5 SDM BHKLN Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Gambar 6 SDM BHKLN Berdasarkan Status Kepegawaian

Demografi BHKLN



Gambar 7 Demografi BHKLN

1.3. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang telah diidentifikasi sehingga menjadi fokus utama BHKLN pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian seluruh program prioritas KKP di tahun 2023 dan kontribusi yang dapat diberikan oleh BHKLN.
2. Keterbatasan SDM dan kebijakan pemerintah terkait pembatasan pengadaan pegawai secara nasional.
3. Dukungan KKP, khususnya BHKLN pada Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.
4. Indonesia (KKP) menjadi tuan rumah penyelenggaraan the 4th Meeting of the Parties (MoP) to the Agreement on Port State Measures (PSMA) di Bali.

1.4. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj ini disusun dengan sistematika sebagaimana berikut:

- Bab I Pendahuluan = Penjelasan umum organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja = Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja = Capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.
- Bab IV Penutup = Simpulan atas capaian serta langkah perbaikan.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Setjen

Sebagai unit kerja di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal, BHKLN tidak memiliki visi dan misi tersendiri melainkan mengadopsi visi dan misi Setjen berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17/KEP-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Adapun visi Setjen, yaitu:

“Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi KKP”

Untuk mewujudkan visi tersebut, adapun rumusan misi Setjen, yaitu peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen dan penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP. Penjabaran misi tersebut dilakukan melalui penetapan tujuan dan indikator, sebagai berikut.

1. Meningkatnya efektivitas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP, dengan indikator indeks sistem merit, indeks pengelolaan keuangan, indeks pengelolaan aset, indeks perencanaan, indeks kearsipan, nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP, persentase penyelesaian regulasi lingkup KKP, rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan KKP, dengan indikator nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP, dan nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Setjen.

2.2. Rencana Kerja BHKLN Tahun 2023

Sasaran Strategis/Kegiatan

Sasaran kegiatan merupakan kondisi ideal yang diharapkan diraih oleh BHKLN sebagai suatu hasil dari outcome dan impact dari keseluruhan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan BHKLN. Di tahun 2023, BHKLN mendukung 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

1. Kegiatan legislasi, litigasi dan kerja sama

Sasaran kegiatan: Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kerja sama internasional

2. Kegiatan pengelolaan komunikasi, informasi publik dan umum

Sasaran kegiatan:

- Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik; dan
- Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

Pada tahun 2023 (sama seperti tahun sebelumnya), terdapat program Prioritas Nasional (PN) yang terdapat di BHKLN, yaitu pada sasaran kegiatan 1: Tata Kelola pemerintahan yang baik di bidang kerja sama internasional. Adapun tagging yang digunakan pada Renja BHKLN tahun 2023, yaitu PN 07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan Program Prioritas 02 – Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri. Sedangkan Kegiatan Prioritas, yaitu 02 - Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional dengan Proyek PN 01- Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerjasama Pembangunan Internasional.

Setelah sasaran kegiatan ditetapkan, kemudian disusun peta strategi yang merangkai hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peta strategi memberikan gambaran visual dari strategi organisasi sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi memiliki berbagai perspektif. Perspektif adalah cara pandang yang digunakan melalui metode Balanced Score Card (BSC) untuk mengelola kinerja organisasi.

2.3. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan IK dan target kinerja yang dituangkan ke dalam PK. PK merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Pada tahun 2023, BHKLN mengelola anggaran sebesar Rp 36.235.315.000. Alokasi anggaran tersebut untuk mencapai 3 sasaran kegiatan yang kemudian dijabarkan

melalui 19 IK dan telah ditetapkan melalui PK yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala BHKLN.

Sepanjang tahun 2023, PK BHKLN mengalami 3 kali penyesuaian atau perubahan, yaitu:

1. PK awal tahun 2023 ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2023 yang terdiri dari 17 IK.
2. PK perubahan I ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2023 yang terdiri dari 18 IK. Adapun latar belakang dilakukannya perubahan terhadap PK, yaitu sebagai tindak lanjut atas implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme kerja untuk penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. PK perubahan II ditandatangani pada tanggal 21 November 2023 yang terdiri dari 19 IK. Perubahan II terhadap PK sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian SAKIP dan RB di KKP.
4. PK perubahan III ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2023 yang terdiri dari 19 IK. Adapun latar belakang perubahan III terhadap PK, yaitu terjadinya pergantian Pimpinan (Sekretaris Jenderal).

Penyesuaian PK disebabkan adanya penyesuaian nomenklatur indikator yang terangkum dalam matriks di bawah ini:

No	Perjanjian Kinerja 9 Januari 2023	Perjanjian Kinerja 5 Juni 2023	Perjanjian Kinerja 21 November 2023	Perjanjian Kinerja 13 Desember 2023
1	Nilai komponen nilai RB yang menjadi tanggung jawab BHKLN	Nilai komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab BHKLN	Nilai komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab BHKLN	Nilai komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab BHKLN
2	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti
3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia yang diterima di forum internasional	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia yang diterima di forum internasional	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia yang diterima di forum internasional	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia yang diterima di forum internasional
4	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan

No	Perjanjian Kinerja 9 Januari 2023	Perjanjian Kinerja 5 Juni 2023	Perjanjian Kinerja 21 November 2023	Perjanjian Kinerja 13 Desember 2023
	undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	masyarakat dan kerja sama luar negeri	masyarakat dan kerja sama luar negeri	masyarakat dan kerja sama luar negeri
5	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik
6	Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik
7	Persentase publikasi program dan kegiatan KKP melalui Lembaga stakeholder lainnya	Persentase efektivitas layanan hubungan Lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	Persentase efektivitas layanan hubungan Lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	Persentase efektivitas layanan hubungan Lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan
8	Persentase pemanfaatan koleksi Perpustakaan KKP oleh anggota Perpustakaan KKP	Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP	Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP	Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP
9	Indeks kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP	Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP	Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP	Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP
10	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi
11	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan BHKLN	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan BHKLN	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan BHKLN	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan BHKLN
12	Persentase penyelesaian	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BHKLN	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BHKLN	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BHKLN

No	Perjanjian Kinerja 9 Januari 2023	Perjanjian Kinerja 5 Juni 2023	Perjanjian Kinerja 21 November 2023	Perjanjian Kinerja 13 Desember 2023
	temuan BPK lingkup BHKLN			
13	Nilai rekonsiliasi kinerja BHKLN	Nilai rekonsiliasi kinerja BHKLN	Nilai penilaian mandiri SAKIP BHKLN	Nilai penilaian mandiri SAKIP BHKLN
14	Indeks profesionalitas ASN BHKLN	Indeks profesionalitas ASN BHKLN	Indeks profesionalitas ASN BHKLN	Indeks profesionalitas ASN BHKLN
15	Persentase BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	Persentase BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	Persentase BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	Persentase BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BHKLN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BHKLN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BHKLN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BHKLN
17	Persentase penyerapan anggaran BHKLN	Persentase penyerapan anggaran BHKLN	Persentase penyerapan anggaran BHKLN	Persentase penyerapan anggaran BHKLN
18	-	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan
19	-	-	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Tabel 2 Perubahan PK BHKLN Tahun 2023

Adapun daftar IK BHKLN di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	
Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan komunikasi	1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik	89,36
	2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik	85,25
	3	Nilai keterbukaan informasi publik	91
	4	Nilai komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab BHKLN	3,7
	5	Persentase efektivitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	80

dan informasi publik	6	Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP	80
Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kerja sama internasional	7	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	90
	8	Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP	85
	9	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	92
	10	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral bidang kelautan dan perikanan	92
Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BHKLN	11	Indeks profesionalitas ASN BHKLN	79
	12	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BHKLN	100
	13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BHKLN	75
	14	Nilai penilaian mandiri SAKIP BHKLN	80,5
	15	Persentase penyerapan anggaran BHKLN	95
	16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100
	17	Persentase unit kerja BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	92
	18	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	75
	19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan BHKLN	1

Tabel 3 Daftar IK BHKLN Tahun 2023

2.4. Monitoring dan Pengukuran Kinerja

Monitoring dan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara periodik baik bulanan, triwulanan maupun tahunan tergantung pada sifat IK tersebut. Namun untuk melihat kemajuan capaian kinerja, secara berkala seluruh unit kerja menyampaikan perkembangan pencapaian IK yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja melalui aplikasi Kinerjaku secara daring dan dilakukan pembahasan secara triwulanan bersama dengan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Setjen. Adapun tujuan dilaksanakannya monitoring dan pengukuran kinerja, yaitu:

- Mengetahui perkembangan capaian kinerja;
- Mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja; melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/sasaran;
- Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan; dan
- Sebagai sumber informasi dalam penyusunan LKj.

2.5. Pemanfaatan Informasi Pada Kinerja Tahun 2022

Sebagai upaya untuk melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dan capaian di tahun 2023, adapun informasi kinerja yang dimanfaatkan berdasarkan LKj BHKLN tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Keterangan
Sasaran Kegiatan 1 : Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik					
1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-	-	89,36	IK baru di 2023 Penyesuaian terhadap KepmenKP 43 Tahun 2023
2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-	-	85,25	IK baru di 2023 Penyesuaian terhadap KepmenKP 43 Tahun 2023
3	Nilai keterbukaan informasi publik	90	91,55	91	Perubahan LKE sehingga target 91
4	Nilai komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab BHKLN	3,65	3,89	3,7	Penyesuaian terhadap Road Map RB tematik sehingga target 3,7
5	Persentase efektivitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	-	-	80	IK baru di 2023 Penyesuaian terhadap KepmenKP 43 Tahun 2023
6	Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP	-	-	80	IK baru di 2023 Penyesuaian terhadap KepmenKP 43 Tahun 2023
Sasaran Kegiatan 2 : Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kerja sama internasional					
7	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	-	-	90	IK baru di 2023 berdasarkan hasil validasi kinerja agar IKK dipisah antara kerja sama bilateral dan kerja sama multilateral
8	Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP	-	-	85	IK baru di 2023 Penyesuaian terhadap KepmenKP 43 Tahun 2023
9	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	-	-	92	IK baru di 2023 berdasarkan hasil validasi kinerja agar IKK dipisah antara kerja sama bilateral dan kerja sama multilateral
10	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral bidang kelautan dan perikanan	-	-	92	IK baru di 2023 Penyesuaian terhadap KepmenKP 43 Tahun 2023

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Keterangan
Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BHKLN					
11	Indeks profesionalitas ASN BHKLN	78	79,29	79	Target berdasarkan PJ IK KKP
12	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup BHKLN	100	100	100	Target berdasarkan PJ IK KKP
13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BHKLN	70	83,33	75	Target berdasarkan PJ IK KKP
14	Nilai penilaian mandiri SAKIP BHKLN	-	-	80,5	IK baru di 2023 berdasarkan PJ IK KKP
15	Persentase penyerapan anggaran BHKLN	95	98,68	95	Target berdasarkan PJ IK KKP
16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100	100	100	Target berdasarkan PJ IK KKP
17	Persentase unit kerja BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	88	100	92	Target berdasarkan PJ IK KKP
18	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	-	-	75	IK baru di 2023 berdasarkan DKO Setjen, BHKLN dan Roren adalah unit kerja yang dibangun menuju WBK
19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan BHKLN	-	-	1	IK baru di 2023 sebagai amanat Renstra bahwa setiap tahun terdapat 1 proposal inovasi yang diajukan di Setjen

Tabel 4 Pemanfaatan Kinerja BHKLN Tahun 2022

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja

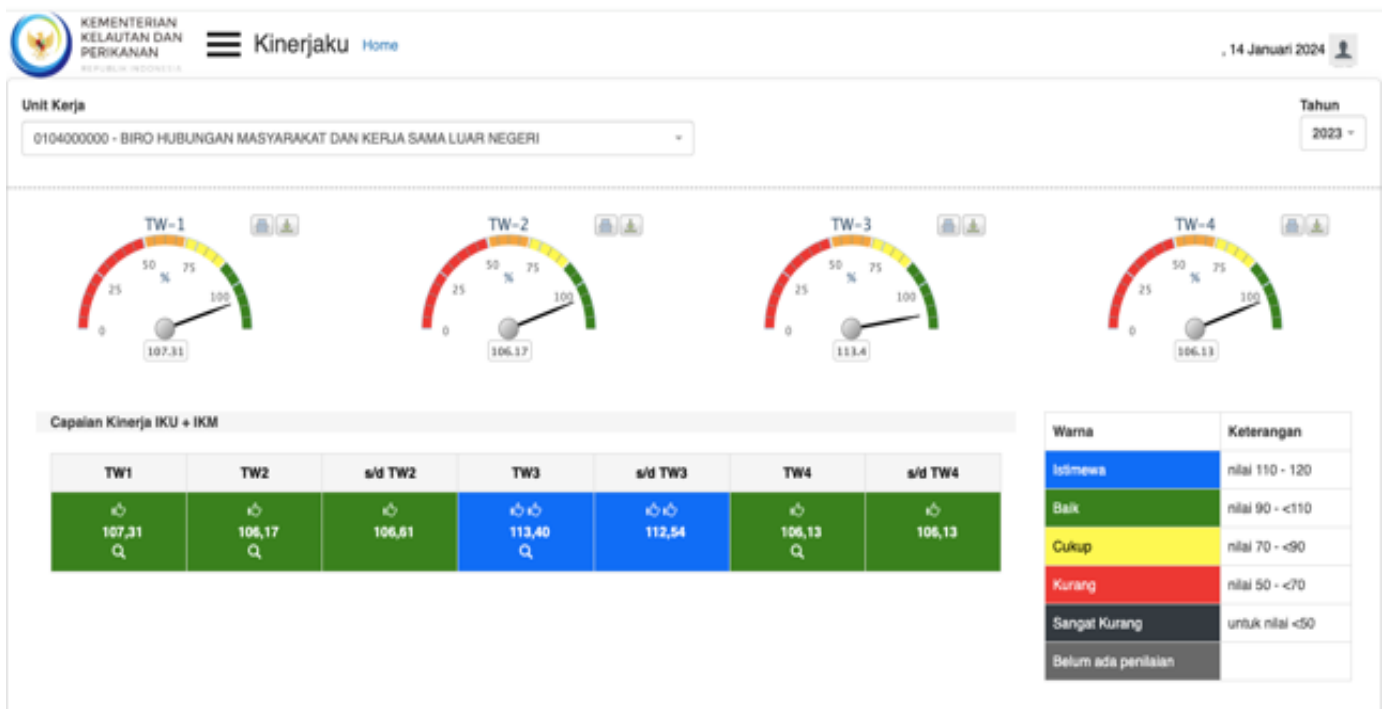
Perencanaan, monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan serta pengumpulan data kinerja di lingkup BHKLN dilakukan oleh Tim Kerja Dukungan Manajerial BHKLN dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku, aplikasi resmi pengelolaan kinerja di KKP yang dikelola Biro Perencanaan. Proses penghitungan kinerja didasarkan kepada formula yang tercantum pada manual masing masing IK yang telah ditetapkan Kepala BHKLN. Capaian kinerja BHKLN tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	
Tata Kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik	89,36	89,36	100
	2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik	85,25	85,25	100
	3	Nilai keterbukaan informasi publik	91	94,51	103,86
	4	Nilai komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab BHKLN	3,7	3,92	105,95
	5	Persentase efektivitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	80	92,26	115,33
	6	Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP	80	88,48	110,60
Tata Kelola pemerintahan yang baik di bidang kerja sama internasional	7	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	90	100	111,11
	8	Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP	85	87,45	102,88
	9	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	92	100	108,70
	10	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral bidang kelautan dan perikanan	92	100	108,70
	11	Indeks profesionalitas ASN BHKLN	79	84,45	106,90

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	
Terwujudnya Layanan Dukungan manajemen yang baik lingkup BHKLN	12	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BHKLN	100	100	100
	13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BHKLN	75	75	100
	14	Nilai penilaian mandiri SAKIP BHKLN	80,5	83,30	103,48
	15	Persentase penyerapan anggaran BHKLN	95	99,55	104,79
	16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100	100	100
	17	Persentase unit kerja BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	92	133,33	120
	18	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	75	81,34	108,45
19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan BHKLN	1	1	100	

Tabel 5 Realisasi dan Capaian Kinerja BHKLN 2023

Tangkapan layar aplikasi Kinerjaku untuk akun BHKLN per tanggal 14 Januari 2024 dimana hasil penghitungan aplikasi menunjukkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau skor kinerja BHKLN pada tahun 2023 sebesar 106,13 tersaji dalam 2 gambar di bawah ini.



Gambar 8 Tangkapan Layar NKO BHKLN Tahun 2023 Pada Aplikasi Kinerjaku

NKO Desember - 2023

Download

Unit Kerja : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

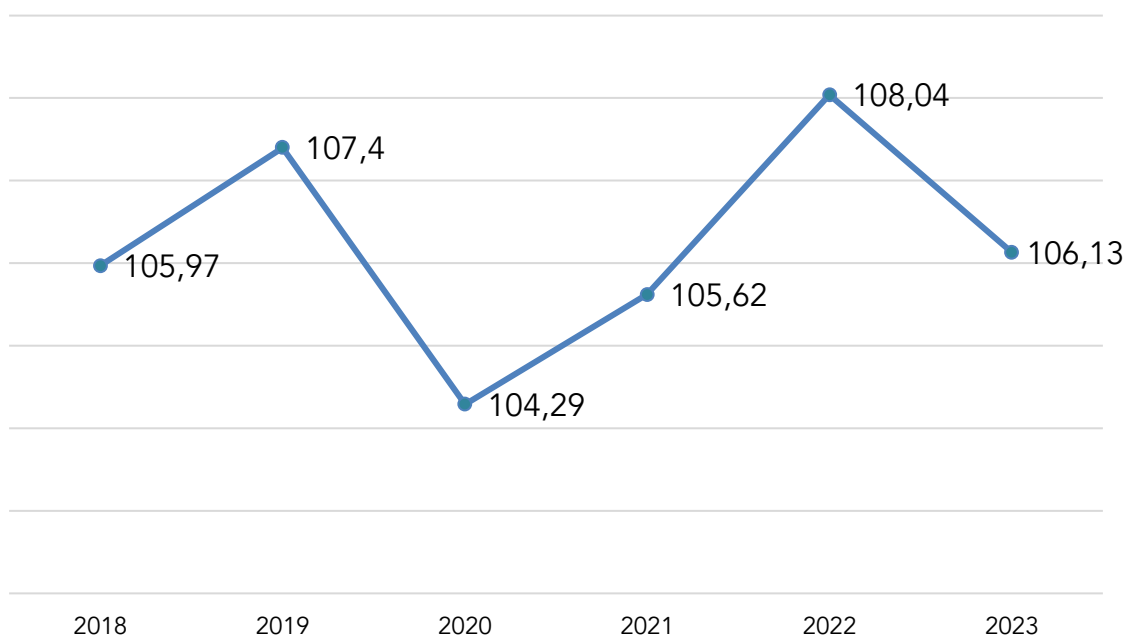
Skor Kinerja : 106.13

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2023	Target Desember	Capaian Desember	%	Target s/d Desember	Capaian s/d Desember	%	Tgl Input
SK.01	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik						104,88			104,88		
IKSK.01	Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Humas dan KLN (nilai) Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,70	3,70	3,92	105,96	3,70	3,92	105,96	03-Jan-2024 14:14
IKSK.05	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Data Dukung1	Nilai	Maximize	Akumulasi	91,00	91,00	94,51	103,86	91,00	94,51	103,86	03-Jan-2024 14:14
IKSK.19	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	92,26	115,33	80,00	92,26	115,33	03-Jan-2024 14:14
IKSK.20	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	88,48	110,60	80,00	88,48	110,60	03-Jan-2024 14:14
IKSK.22	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	89,36	89,36	89,36	100,00	89,36	89,36	100,00	03-Jan-2024 14:14
IKSK.23	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,25	85,25	85,25	100,00	85,25	85,25	100,00	03-Jan-2024 14:14
SK.02	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional						108,73			108,73		
IKSK.02.6	Persentase Kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90,00	90,00	100,00	111,11	90,00	100,00	111,11	03-Jan-2024 14:14
IKSK.02.7	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	87,45	102,88	85,00	87,45	102,88	03-Jan-2024 14:14
IKSK.02.8	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	92,00	100,00	108,70	92,00	100,00	108,70	03-Jan-2024 14:14
IKSK.02.9	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral bidang kelautan dan perikanan Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	92,00	100,00	108,70	92,00	100,00	108,70	03-Jan-2024 14:14
SK.03	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri						104,79			104,79		
IKSK.03.1	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	03-Jan-2024 14:14
IKSK.03.2	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	81,34	108,45	75,00	81,34	108,45	03-Jan-2024 14:14
IKSK.03.3	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Biro Humas dan KLN Data Dukung1	inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	03-Jan-2024 14:14
IKSK.03.4	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Data Dukung1	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	79,00	79,00	84,45	106,90	79,00	84,45	106,90	03-Jan-2024 14:14
IKSK.03.5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00	03-Jan-2024 14:14
IKSK.03.6	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	03-Jan-2024 14:14
IKSK.03.7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro HHLN Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,50	80,50	83,30	103,48	80,50	83,30	103,48	03-Jan-2024 14:14
IKSK.03.8	Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	92,00	133,33	120,00	92,00	133,33	120,00	03-Jan-2024 14:14
IKSK.17	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Humas dan KLN Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	99,55	104,79	95,00	99,55	104,79	03-Jan-2024 14:14

Tutup

Gambar 9 Tangkapan Layar Capaian Indikator Kinerja BHKLN Tahun 2023 Pada Aplikasi Kinerjaaku

Adapun progres NKO BHKLN beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut.



Gambar 10 Capaian NKO BHKLN Tahun 2018 - 2023

Analisis Kinerja

Metode analisis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen;
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada) merupakan penjelasan apabila terdapat pemeringkatan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) penilai posisi/peringkat KKP secara nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: berisi tentang penyebab keberhasilan ketercapaian/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya/kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target IK selama tahun 2023;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya: Penggunaan sumber daya baik anggaran dan SDM serta sumber daya lainnya antara lain melalui pelaksanaan

- kegiatan koordinasi/kolaboratif program dan kegiatan untuk mencapai IK baik antar unit kerja atau K/L maupun instansi dan lembaga terkait;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja berisikan tentang kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian; dan
 8. Untuk IK yang bersifat tahunan, tetap dijelaskan dalam LKj dengan menyampaikan progres kegiatan pendukung yang telah dilakukan di dengan dilengkapi dokumentasi serta kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IK.

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja IK dengan penjelasan sebagai berikut.

IK 1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja K/L maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Konteks informasi dalam Indeks PIKP adalah program prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden. Indeks PIKP disusun berdasarkan konsep manajemen komunikasi kehumasan serta agenda setting. Indeks ini tidak saja melibatkan responden unit pelayanan informasi dan komunikasi publik pada instansi pemerintah pusat dan daerah (dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi), tetapi juga masyarakat.

Sasaran Kegiatan 1 Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik													
IK 1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik													
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024	
-	-	-	-	-	89,36	89,36	100%	-	-	-	-	-	

Tabel 6 Rincian Capaian IK Nilai Dimensi Input Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pada tahun 2022, KKP telah mengisi kuesioner survei PIKP yang dikirimkan oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen. Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hasil survei PIKP yang telah diajukan secara mandiri oleh KKP kemudian dinilai dan hasilnya diumumkan

pada tahun 2023 pada Buku Indeks PIKP. Pengukuran ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kinerja masing-masing instansi pengelola informasi dan komunikasi publik di tingkat K/L dan Dinas Kominfo Provinsi.

Indeks PIKP terdiri atas 4 dimensi penilaian, yaitu dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan dimensi outcome. Untuk level K/L penilaian atas Indeks PIKP hanya dilakukan pada dimensi input dan dimensi proses. Adapun hasil KKP pada dimensi input adalah sebagai berikut.

No.	Kementerian/Lembaga non Kementerian	Variabel Dimensi Input				Skor Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana & Prasarana	Media & Saluran Komunikasi		
1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100	100	94,74	100	98,68	Sangat Baik
2	Kementerian Pertanian	100	90,71	100	100	97,68	Sangat Baik
3	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	92,31	95	89,47	100	94,20	Sangat Baik
4	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	100	77,63	100	91,67	92,32	Sangat Baik
5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	100	76,92	89,47	100	91,60	Sangat Baik
6	Kementerian Kesehatan	92,31	75,99	94,74	100	90,76	Sangat Baik
7	Kementerian Perindustrian	92,31	91,09	84,21	91,67	89,82	Sangat Baik
8	Kementerian Dalam Negeri	100	77,02	94,74	87,50	89,81	Sangat Baik
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	92,31	77,63	100	87,50	89,36	Sangat Baik
10	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	92,31	89,04	84,21	91,67	89,31	Sangat Baik

Tabel 7 Skor Indeks PIKP Dimensi Input Kategori K/L Non Kementerian Tahun 2022

IK ini merupakan indikator baru di tahun 2023 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) karena indikator ini baru ditetapkan di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional, skor dimensi input KKP menempati posisi ke-9 diantara 64 K/L.

Keberhasilan dalam memenuhi target ditentukan oleh pemenuhan terhadap variabel dimensi input dalam indeks PIKP, yaitu: anggaran; bahan informasi; sarana dan prasarana; dan media dan saluran komunikasi. Untuk variabel sarana dan prasarana, KKP mencapai nilai maksimal sebesar 100 yang didukung oleh dua indikator, yakni ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah (infrastruktur komunikasi dan informasi serta telekomunikasi); dan ketersediaan pedoman internal atau mekanisme tertentu terkait keamanan data pribadi dalam PIKP. Upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai pada variabel yang masih rendah di tahun 2022, yaitu pada dimensi input untuk variabel bahan informasi dengan capaian nilai hanya sebesar 77,63.

IK 2 Nilai Dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Pengukuran dimensi proses dalam indeks PIKP tahun 2022 ini dilakukan terhadap empat variabel, yaitu 1) pengumpulan data dan informasi; 2) perencanaan program/kegiatan; 3) pelaksanaan program/kegiatan; serta 4) monitoring dan evaluasi. Khusus untuk variabel perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan terdapat penambahan jumlah indikator, yang semula masing-masing tiga indikator menjadi enam indikator. Alasan penambahan ini karena ingin mengukur konsep pemerataan informasi yang secara ideal harus menjangkau segmen khusus, dan semua wilayah serta mengungkap faktor-faktor penghambat pelaksanaan PIKP.

Sasaran Kegiatan 1 Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik													
IK2 2 Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik													
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024	
-	-	-	-	-	85,25	85,25	100%	-	-	-	-	-	

Tabel 8 Rincian Capaian IK Nilai Dimensi Proses Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Untuk level K/L penilaian atas indeks PIKP hanya dilakukan pada dimensi input dan dimensi proses. Adapun hasil KKP pada dimensi proses adalah sebagai berikut.

No.	Kementerian/Lembaga non Kementerian	Variabel Dimensi Proses				Skor Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring & Evaluasi		
1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100	100	94,53	100	98,63	Sangat Baik
2	Kementerian Pertanian	100	91,67	95,87	100	96,88	Sangat Baik
3	Badan Intelijen Negara	100	100	85,26	100	96,32	Sangat Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	100	95	85,90	100	95,22	Sangat Baik
5	Kementerian Dalam Negeri	88,89	100	91,47	88,89	92,31	Sangat Baik
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	100	81,67	84,94	100	91,65	Sangat Baik
7	Kementerian Sekretariat Negara	77,78	95	93,79	100	91,64	Sangat Baik
8	Komisi Pemberantasan Korupsi	100	91,67	83,72	88,89	91,07	Sangat Baik
9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100	100	63,84	100	90,96	Sangat Baik
10	Kementerian Kesehatan	100	100	85,90	77,78	90,92	Sangat Baik
11	Sekretariat Kabinet	77,78	100	79,45	100	89,31	Sangat Baik
12	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	100	100	68,77	77,78	86,64	Sangat Baik
13	Kementerian Sosial	77,78	83,33	85,39	100	86,62	Sangat Baik
14	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	100	91,67	65,89	88,89	86,61	Sangat Baik
15	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	66,67	100	79,19	100	86,47	Sangat Baik
16	Kementerian Perdagangan	66,67	95	80,56	100	85,56	Sangat Baik
17	Kementerian Perindustrian	88,89	85	79,31	88,89	85,52	Sangat Baik
18	Badan Riset dan Inovasi Nasional	66,67	91,67	83,40	100	85,43	Sangat Baik
19	Kementerian Kelautan dan Perikanan	66,67	91,67	82,67	100	85,25	Sangat Baik
20	Kementerian Ketenagakerjaan	77,78	91,67	84,70	77,78	82,98	Sangat Baik

Tabel 9 Skor Indeks PIKP Dimensi Input Kategori K/L Non Kementerian Tahun 2022

IK ini merupakan indikator baru di tahun 2023 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) karena indikator ini baru ditetapkan di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional, **skor dimensi proses, KKP menempati posisi ke-19 diantara 64 K/L.**

Faktor pendukung keberhasilan atas pencapaian target IK ini, yaitu pemenuhan terhadap variabel dimensi proses dalam indeks PIKP, yaitu: pengumpulan data; perencanaan; pelaksanaan; dan monitoring dan evaluasi. Untuk variabel monitoring dan evaluasi, KKP mencapai nilai maksimal sebesar 100 yang didukung oleh tiga indikator, yakni Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan; kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media terkait liputan pelaksanaan program/kegiatan (baik media konvensional maupun media baru); dan keberadaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi" pelaksanaan program/kegiatan. Upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai pada variabel yang masih rendah di tahun 2022, yaitu pada variabel pengumpulan data dan informasi yang hanya mencapai nilai 66,70.

IK 3 Nilai keterbukaan informasi publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Informasi publik sendiri berdasarkan Undang-Undang tersebut berupa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/SJ/2019 dan Tim Pengelola Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74/KEPMEN-KP/SJ/2019.

Monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2023 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 11 Tahapan Monev KIP Tahun 2023

A. Pengisian Kuesioner (18 Agustus 2023 – 18 September 2023)

KKP melalui BHKLN melakukan pengisian kuesioner evaluasi atau Self Assesment Questionary (SAQ) melalui aplikasi Monev elektronik yang disiapkan oleh Komisi Informasi Pusat pada laman e-monev.komisiinformasi.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengisian kuesioner Monev KIP tahun 2023 menggunakan aplikasi Monev elektronik pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/>;
- b) Pengisian kuesioner pada aplikasi Monev elektronik dapat dilakukan oleh badan publik, sebagai berikut:
 - Bagi badan publik yang telah memiliki akun tanpa perubahan data, dapat langsung login pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/login>;
 - Bagi badan publik yang telah memiliki akun, namun ingin melakukan perubahan data responden, dapat menghubungi koordinator masing-masing kategori badan publik untuk dilakukan reset akun;
 - Bagi badan publik yang belum memiliki akun, dapat melakukan registrasi pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/registrasi> dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. E-mail register badan publik pada data responden adalah alamat resmi email Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik;
 - ii. Akun badan publik akan dilakukan verifikasi dan aktivasi oleh Komisi Informasi Pusat; dan
 - iii. Akun badan publik yang telah terverifikasi, dapat melakukan login.
- c) Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki batas maksimal file PDF sebesar 2 MB/pertanyaan (apabila melebihi batas ukuran dapat mencantumkan alamat URL/Dropbox/Google Drive/lainnya).

Sebagai upaya persiapan pengisian kuesioner, pada tanggal 22 Agustus 2023 di Ruang Rapat Arwana, Gedung Mina Bahari II Kantor Pusat KKP, telah dilaksanakan



Gambar 12 Kegiatan Workshop Petunjuk Pengisian Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Lingkup KKP

Publik di Lingkungan KKP Tahun 2023". Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan dihadiri oleh perwakilan PPID Pelaksana (unit kerja eselon I dan Unit Pelaksana Teknis/UPT).

B. Verifikasi Data Kuesioner (19 September – 11 Oktober 2023)

Verifikasi data kuesioner dilakukan dengan cara:

- a) Memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam e-monev.komisiinformasi.go.id;
- b) Verifikasi data dalam aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Penilaian melalui situs/portal yang tercantum dalam kolom "link" pada lembar evaluasi diri;
 - ii. Data dukung berupa dokumen dalam format PDF (dokumen utuh)/alamat URL/Dropbox/Google Drive/lainnya yang tercantum dalam "Upload".
- c) Badan publik yang memenuhi nilai batas minimal (passing grade) kuesioner 60 disertakan dalam tahapan presentasi uji publik.

C. Presentasi Uji Publik (23 Oktober – 27 Oktober 2023)

Presentasi uji publik diikuti oleh badan publik yang telah memenuhi nilai batas minimal (passing grade) 60. Tata cara presentasi dan penilaian tahapan presentasi akan diberitahukan kemudian.

D. Visitasi (November 2023)

Visitasi dilakukan kepada sekurang-kurangnya 10 badan publik terbaik dari seluruh kategori untuk menetapkan 5 terbaik nasional dan pimpinan badan publik kandidat penerima Anugerah Tinarbuka Tahun 2024.

E. Pengumuman dan Penganugerahan

Komisi Informasi Pusat menyampaikan hasil Monev KIP 2023 melalui pengumuman hasil Monev KIP 2023 dihadapan Presiden RI.

F. Parameter Penilaian Evaluasi, meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik;
- b) Kualitas informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru);
- c) Jenis informasi, yaitu informasi terbuka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d) Komitmen organisasi, berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, SDM, regulasi dan tugas pokok dan fungsi;
- e) Digitalisasi sebagai proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik; dan
- f) Inovasi dan strategi sebagai pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisasi terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.

G. Pembobotan Penilaian Evaluasi Monev KIP

Penilaian kuesioner bobot nilai 80%. Penilaian kuesioner dilakukan dengan formula:

$$\text{Nilai Passing Grade} = \frac{(\text{Nilai kuesioner})}{2} \times 80\%$$

Catatan: Nilai batas minimal (passing grade) penilaian kuesioner adalah 60 sebagai syarat badan publik disertakan dalam tahap penilaian selanjutnya

H. Penilaian Kuesioner

Pada tahapan penilaian kuesioner, terdiri atas evaluasi terhadap aspek-aspek standar layanan informasi yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

No	Aspek Penilaian	Parameter	Nilai	Bobot Nilai
1	Kualitas informasi	Informasi wajib disediakan dan diumumkan berkala	20	60
		Informasi dikecualikan		
		Daftar informasi publik		
2	Pelayanan informasi	Prosedur	20	
		Substansi		
		Pelaporan/ <i>Complaint handle</i>		
3	Jenis informasi	Tersedia setiap saat	20	
		Informasi terbuka lainnya		
4	Sarana dan prasarana	Elektronik	20	40
		Non elektronik		
5	Komitmen organisasi	Profil PPID lengkap disertai tugas, legalitas dan struktur	15	
		Pelaksanaan tugas Atasan PPID		
		Pelaksanaan tugas PPID Utama		
		Anggaran PPID / Keterbukaan Informasi		
6	Digitalisasi	Aplikasi-aplikasi teknologi informasi terkait keterbukaan informasi	15	
		Penyediaan platform dalam Play Store		
		Aktivitas media sosial		

Tabel 10 Bobot Penilaian Terhadap Aspek-Aspek Standar Layanan Informasi

I. Penilaian Presentasi Uji Publik

Tahapan penilaian presentasi uji publik memiliki bobot nilai 20%. Aspek penilaian tahapan presentasi uji publik meliputi:

- a. Inovasi, pengembangan dan atau kreasi teknologi informasi dalam layanan informasi publik, SPBE dan pengadaan barang dan jasa.
- b. Strategi, berkaitan pengembangan peta jalan/road map KIP yang meliputi kebijakan, program, anggaran dalam upaya mendukung program prioritas pemerintah.
- c. Klarifikasi, penilaian terhadap temuan-temuan penilaian dan atau masukan masyarakat.

J. Penetapan Kategori

Penetapan kategori badan publik hasil Monev KIP tahun 2023 berdasarkan akumulasi penilaian dari tahapan kuesioner, verifikasi data dan presentasi dengan formula:

$$\text{Nilai Kategori} = \left(\frac{\text{Nilai kuesioner}}{\text{Nilai verifikasi}} \times 80\% \right) + (\text{nilai presentasi} \times 20\%)$$

Nilai kategori adalah skor yang diperoleh badan publik sebagai dasar penetapan kategori KIP:

- a) Kategori Informatif, dengan nilai 90 -100;
- b) Kategori Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9;
- c) Kategori Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9;
- d) Kategori Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9; dan
- e) Kategori Tidak Informatif, dengan nilai <39,9.

Sasaran Kegiatan 1 Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik													
IK 3 Nilai keterbukaan informasi publik													
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024	
68,82	90,4	92,08	96	91,55	91	94,51	103,86%	3,23%	82	115,25%	82	115,25%	

Tabel 11 Rincian Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Pencapaian IK ini merupakan hasil dari penilaian Monev KIP yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap badan publik yang terbagi atas 7 kategori. Hasil Monev KIP 2023 dituangkan ke dalam Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2023 sebagai berikut.

KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	96,72
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	96,39
3	Kementerian Pertanian	96,11
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	96,09
5	Kementerian Pemuda dan Olahraga	95,80
6	Kementerian Perhubungan	95,76
7	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	95,64
8	Kementerian Keuangan	95,63
9	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	95,45
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	95,42
11	Kementerian Perdagangan	95,34
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	94,51
13	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	94,11
14	Kementerian Ketenagakerjaan	93,91
15	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	93,82
16	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	93,33
17	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	92,49
18	Kementerian Luar Negeri	91,96
19	Kementerian Perindustrian	91,68
20	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	91,63

Tabel 12 Hasil Monitoring dan Evaluasi KIP Pada Badan Publik Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 91 maka target tersebut telah tercapai dengan realisasi sebesar 94,51 (103,86%). Jika dibandingkan dengan target tahun-tahun sebelumnya, terdapat peningkatan signifikan capaian pada tahun 2019 sebesar 90,4 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang hanya sebesar 68,82 dan mengalami kenaikan secara terus menerus hingga tahun 2021 yang mencapai nilai tertinggi sebesar 96. Namun capaian ini turun menjadi 91,55 pada tahun 2022 dan kembali meningkat di tahun 2023 dengan capaian sebesar 94,51. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 82 yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) maka target tersebut telah tercapai dengan persentase capaian sebesar 115,25%. Jika dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional, Nilai KIP KKP tahun 2023 menempati posisi ke-12 untuk kategori Badan Publik Kementerian.

Faktor utama tercapainya target pada IK ini, yaitu konsolidasi internal yang dilakukan bersama unit kerja eselon I lingkup KKP terhadap seluruh tahapan penilaian KIP, termasuk pendampingan oleh Komisi Informasi Pusat pada seluruh tahapan penilaian tersebut. Selain itu juga komitmen Pimpinan baik di Pusat maupun di UPT untuk melakukan perbaikan secara masif di tahun 2023. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian di tahun berikutnya, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap seluruh pertanyaan kuesioner dan menyiapkan dokumen pendukung terhadap seluruh pertanyaan tersebut.



Gambar 13 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kepada KKP Diwakili oleh Inspektur Jenderal KKP, 19 Desember 2023 di Istana Wakil Presiden RI

Gambar 14 Penyampaian Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Inspektur Jenderal KKP Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan



IK 4 Nilai komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab BHKLN

RB merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Untuk memastikan pengelolaan RB secara efektif, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map RB nasional, yaitu Road Map RB tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024.

Saat ini RB telah memasuki periode ketiga. Pada tahap terakhir ini, RB diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Untuk mencapai harapan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun sasaran RB periode 2020-2024, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Sasaran Kegiatan 1 Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik													
IK 4 Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab BHKLN													
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024	
3,44	3,63	4,11	3,91	3,65	3,7	3,92	105,95%	7,40%	3,70	105,95%	3,75	104,53%	

Tabel 13 Rincian Capaian IK Nilai Komponen RB KKP yang Menjadi Tanggung Jawab BHKLN

Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 3,7 maka target tersebut telah tercapai dengan realisasi sebesar 3,92 (105,95%). Jika dibandingkan dengan target tahun-tahun sebelumnya, terdapat konsistensi peningkatan capaian sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 dan mengalami penurunan capaian pada tahun 2021 yang diikuti penurunan juga di tahun 2022 dengan capaian nilai sebesar 3,65. Namun capaian ini kembali meningkat di tahun 2023 dengan capaian sebesar 3,92. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 3,75 yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) maka target tersebut telah tercapai dengan persentase capaian sebesar 104,53%. Sedangkan pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang dapat dijadikan acuan oleh BHKLN untuk dijadikan pembandingan.

Tercapainya target pada IK ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan RB KKP area manajemen perubahan yang menjadi tanggung jawab BHKLN. Kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, yaitu kolaborasi dengan Tim Pelaksana Hari Peringatan Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tentang persiapan rencana pemberian

penghargaan/reward kepada unit kerja/pegawai KKP yang telah melakukan perubahan (reform) dan mendapatkan penghargaan dari pihak eksternal. Terdapat 44 penghargaan yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap unit kerja yang dinilai telah melakukan perubahan (reform) dan berprestasi. Sehubungan dengan perubahan Road Map RB Nasional yang bersifat tematik (tidak lagi dilakukan per area perubahan), sehingga tidak dapat dilakukan upaya perbaikan untuk tahun berikutnya.



Gambar 15 Pemberian Penghargaan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

IK 5 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan

Untuk mengukur efektifitas layanan, dilakukan survei pelayanan kepada *stakeholder* yang telah menerima layanan hubungan lembaga dengan metode penyebaran kuesioner yang dilakukan secara berkala. Terdapat 4 jenis kuesioner yang disiapkan

dan diisi berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Adapun jenis kuesioner dan respondennya, yaitu:

No.	Jenis Kuesioner	Responden
1.	Rapat Kerja (Raker) atau Rapat Dengar Pendapat (RDP)	Sekretariat Komisi (Setkom) IV DPR-RI, Setkom II DPD-RI, Tenaga Ahli, perwakilan unit kerja eselon I KKP terkait
2.	Kunjungan Kerja (Kunker) Masa Reses atau Kunker Spesifik	Setkom IV DPR-RI, Setkom II DPD-RI, Tenaga Ahli, perwakilan unit kerja eselon I KKP terkait, perwakilan Pemda, dan mitra yang dikunjungi
3.	Kunker Menteri Kelautan dan Perikanan	Setkom IV DPR-RI, Setkom II DPD-RI, Tenaga Ahli, dan perwakilan unit kerja eselon I KKP terkait
4.	Unjuk Rasa (Unras)	Koordinator Lapangan (Koorlap) Tim Unras, Kepolisian RI, unit kerja eselon I lingkup KKP

Tabel 14 Jenis Kuesioner dan Responden Kuesioner Terhadap IK Persentase Efektifitas Layanan Hubungan Lembaga Kepada Mitra Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah angka atau besaran persentase efektifitas yang besarnya diperoleh dari penilaian oleh *stakeholder* melalui pengisian kuisisioner. Penyebaran dan pengumpulan kuisisioner secara daring (menggunakan aplikasi Google Form) untuk layanan hubungan lembaga BHKLN.

Sasaran Kegiatan 1 Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik													
IK 5 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan													
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024	
-	-	-	-	-	80	92,26	115,33%	-	-	-	-	-	

Tabel 15 Rincian Capaian IK Persentase Efektifitas Layanan Hubungan Lembaga Kepada Mitra Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan

Daftar pertanyaan dalam survei adalah efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi antara penghubung KKP dengan Setkom IV DPR RI terkait persiapan Kunker?
2. Bagaimana koordinasi antara penghubung KKP dengan para mitra DPR RI terkait pelaksanaan Kunker?
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan penghubung KKP dalam memberikan pelayanan Kunker?
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan penghubung KKP dalam menyelesaikan kendala di lapangan?
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang keramahan penghubung KKP dalam memberikan setiap pelayanan?

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab penghubung KKP dalam seluruh kegiatan?

Jumlah responden survei adalah 14 orang. Setiap responden memberi nilai kepada setiap pertanyaan survei dalam bentuk angka mutu (1, 2, 3 dan 4). Dengan demikian jumlah maksimal angka mutu yang bisa diperoleh dari survei, yaitu:

$$\text{Jumlah maksimal angka mutu} = 4 \times 6 \times 14 = 336$$

Hasil survei menunjukkan jumlah angka mutu untuk setiap pertanyaan dari semua responden:

Pertanyaan 1 = 51

Pertanyaan 2 = 52

Pertanyaan 3 = 52

Pertanyaan 4 = 51

Pertanyaan 5 = 53

Pertanyaan 6 = 52

Oleh karena itu, jumlah angka mutu hasil survei = 51 + 52 + 52 + 51 + 53 + 52 = **310**

Dengan demikian

$$\% \text{ Efektifitas} = \frac{\text{Jumlah angka mutu hasil survei}}{\text{Jumlah maksimal angka mutu}} \times 100\% = \frac{310}{336} \times 100\% = 92,26\%$$

Adapun masing-masing realisasi persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2023 adalah sebesar 92,26%. Berdasarkan manual IK persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan dengan besar target sebesar 80% maka persentase capaian dihitung sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{92,26\%}{80\%} \times 100\% = 115,33\%$$

IK ini merupakan indikator baru di tahun 2023 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) karena indikator ini baru ditetapkan di tahun 2023. Sedangkan pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang dapat dijadikan acuan oleh BHKLN untuk dijadikan perbandingan.

Faktor utama pendukung capaian, yaitu koordinasi secara intensif yang dilakukan oleh BHKLN sebagai “Penghubung” antara lembaga mitra dengan unit kerja eselon I terkait di KKP dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan *stakeholder*. Selain itu juga keterlibatan aktif lembaga mitra dalam pengisian kuesioner setelah pelaksanaan kegiatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian di tahun berikutnya, yaitu dengan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif terkait pelaksanaan kegiatan yang melibatkan *stakeholder*.

% Efektifitas Layanan	Kinerja Layanan
25,00 - 64,99	Tidak Efektif
65,00 - 76,60	Kurang Efektif
76,61 - 88,30	Efektif
88,31 - 100,00	Sangat Efektif

Tabel 16 Tingkat Efektifitas Layanan Hubungan Lembaga

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah **sangat efektif** karena persentase efektifitas berada dalam rentang antara 88,31% sampai dengan 100%. Data dukung berisi hasil survei dan pengolahan data untuk mendapatkan masing-masing persentase efektifitas dapat dilihat dalam tautan: <https://bit.ly/41NuGJe>.



Gambar 16 Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kalimantan Timur, 12 Desember 2023

Gambar 17 Rapat Kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI, 14 November 2023



Untuk mengukur kepuasan layanan, dilakukan survei pelayanan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan KKP dengan metode penyebaran kuesioner yang dilakukan setiap triwulan. Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan skala likert dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam pengukuran skala likert, nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" yang dilekatkan kepada setiap unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$$

Diketahui jumlah bobot = 1 sedangkan jumlah unsur = 9 (jumlah unsur yang dikaji berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Ke-9 unsur survei pelayanan Perpustakaan KKP disampaikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a) Apakah Saudara dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia?
- b) Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan?
- c) Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan?
- d) Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?
- e) Apakah produk hasil layanan perpustakaan yang Saudara terima telah sesuai dengan standar pelayanan?
- f) Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
- g) Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
- h) Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana perpustakaan?
- i) Bagaimana pendapat Saudara tentang fasilitas penanganan pengaduan pengguna layanan (e-mail, media sosial perpustakaan)?

Bobot nilai tertimbang ditentukan oleh Perpustakaan tidak berbeda antar unsur atau merata sehingga bobot nilai tertimbang semua unsur = $1/9 = 0,11$. Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

SKM = (Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai SKM} = \text{SKM} \times 25$$

Sasaran Kegiatan 1 Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik												
IK 6 Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP												
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	-	-	-	80	88,48	110,60%	-	-	-	-	-

Tabel 17 Rincian Capaian IK Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP

Hasil dari penyebaran kuisioner sepanjang tahun 2023, seluruh responden tersebut menerima layanan yang jenisnya diantaranya adalah:

- Layanan anak;
- Layanan penelusuran informasi;
- Layanan keanggotaan; dan
- Layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian koleksi).

Tabulasi hasil pengolahan survei yang dilakukan Perpustakaan tabel dapat dilihat dalam matriks berikut.

Nilai	Unsur									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jumlah	242,00	245,00	245,00	281,00	243,00	248,00	258,00	252,00	280,00	
Rata-rata	3,36	3,40	3,40	3,90	3,38	3,44	3,58	3,50	3,89	
Bobot	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	
Rata-rata x bobot	0,38	0,38	0,36	0,43	0,37	0,38	0,40	0,40	0,43	
Nilai Indeks SKM										3,54
Nilai Indeks SKM x 25										88,48

Tabel 18 Tabulasi Perhitungan Nilai SKM Perpustakaan KKP Tahun 2023

Mengacu pada tabulasi di atas, realisasi nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP pada triwulan IV 2023 adalah 88,48. Dengan target pada triwulan IV sebesar 80 maka persentase capaian IK ini adalah:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{88,48\%}{80\%} \times 100\% = 110,60\%$$

IK ini merupakan indikator baru di tahun 2023 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) karena indikator ini baru ditetapkan di tahun 2023. Sedangkan pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang dapat dijadikan acuan oleh BHKLN untuk dijadikan pembandingan.

Penentuan mutu pelayanan dan kinerja Perpustakaan KKP mengacu kepada tabel di bawah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 19 Konversi Nilai SKM Pelayanan Publik

Jika mengacu pada di atas, maka kinerja Perpustakaan KKP adalah ‘Sangat Baik’ karena besar nilai indeks SKM x 25 adalah 88,48 dan masuk ke dalam kisaran 88,31 – 100.



Gambar 18 Forum Komunikasi Perpustakaan Khusus di Lingkungan KKP, 22 – 23 Agustus 2023 secara hybrid di Archipelago Indonesia Marine Library

Faktor utama pendukung keberhasilan tercapainya target, yaitu komitmen penyelenggara Perpustakaan KKP dalam menyiapkan seluruh fasilitas yang menjadi pertanyaan pada kuesioner survei kepuasan yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Perpustakaan KKP. Upaya untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya, yaitu dengan melakukan perbaikan pada unsur survei yang nilai capaiannya masih rendah. Adapun data mentah dan hasil pengolahan survei kepuasan pelayanan Perpustakaan KKP pada triwulan IV 2023 dapat dilihat dalam tautan <https://bit.ly/41NFQxQ>.

IK 7 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BHKLN bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, pengembangan program, dan pembinaan hubungan masyarakat, kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai manifestasi dari tugas tersebut, BHKLN mengemban fungsi untuk penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan dan penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan informasi di atas dan berdasarkan benchmarking ke Kementerian Luar Negeri, BHKLN merumuskan IK, yaitu persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama. Definisi dari IK ini adalah sebagai berikut:

- Tindak lanjut/implementasi adalah tindakan yang diambil untuk langkah-langkah lanjut/pelaksanaan/penerapan atas kesepakatan internasional.
- Kesepakatan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia (Pemri) dengan satu atau lebih negara, Organisasi Internasional (OI) atau subjek hukum lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemri yang bersifat hukum publik.

Berdasarkan hasil rapat validasi IK pada tanggal 27 November 2022 bersama dengan Biro Perencanaan dan Inspektorat I, terdapat rekomendasi agar dilakukan pemisahan IK yang semula hanya “Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama” menjadi 2 IK sebagai berikut.

1. Persentase dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti; dan
2. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional.

Sasaran Kegiatan 2 Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kerja sama internasional													
IK 7 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti													
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024	
-	-	-	-	-	90%	100%	111,11%	-	-	-	-	-	

Tabel 20 Rincian Capaian IK Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Ditindaklanjuti

Formula penghitungan realisasi IK sebagai berikut.

$$\% \text{ Kerja Sama Bilateral} = \frac{\text{Jumlah dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah dokumen kerja sama yang rencananya akan ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti = Dokumen kerja sama bilateral yang masuk dalam daftar rencana yang akan ditindaklanjuti di tahun 2023 dan telah tertindaklanjuti.
- Jumlah dokumen kerja sama yang rencananya akan ditindaklanjuti = Dokumen kerja sama bilateral yang rencananya akan ditindaklanjuti di tahun 2023.

No	Kawasan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Amerika dan Eropa	13	13	100,00%
2	Asia dan Pasifik	9	9	100,00%
3	Afrika dan Timur Tengah	3	3	100,00%
Jumlah		26	26	100,00%
Target 2023				92%
% Capaian 2023				111,11%

Tabel 21 Persentase Capaian Kinerja Kerja Sama Bilateral per Kawasan Tahun 2023

Realisasi kegiatan kerja sama bilateral oleh BHKLN sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kawasan	No	Kegiatan Tindak Lanjut
Amerika dan Eropa	1	Rapat-rapat internal dan interkem pembahasan counterdraft dari pihak Amerika Serikat (AS) tentang perjanjian kerja sama konservasi penyus belimbing RI-AS
	2	Rapat pembahasan rancangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Ditjen. Perikanan Budi Daya dan Oceanic Institute of Hawai'i Pacific University
	3	Rapat koordinasi persiapan Pertemuan ke-5 Working Group on Trade, Investment and Industry (WGII) RI-Rusia
	4	Rapat pembahasan usulan program prioritas KKP untuk Road Map Implementasi Cooperation and Capacity Building (CCB) Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EFTA CEPA) tahun 2023 dan proposal Delegasi Norwegia dalam Pertemuan the 1 st Sub-Committee Meeting on Cooperation & Capacity Building (SCM CCB) I-EFTA CEPA
	5	Rapat penyusunan bahan posisi runding investment chapter pada Perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) ke-13
	6	Rapat rencana amandemen pertama Grant Implementation Agreement on Marine and Fisheries Portfolio (GIAMFP)
	7	Rapat interkem rencana pemberlakuan Mutual Recognition Agreement on Certification of Fishing Vessel Personnel RI-Spanyol
	8	Laporan Courtesy Call Duta Besar (Dubes) Denmark dan Komite Kebijakan Luar Negeri Parlemen Denmark dengan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, KKP
	9	Rapat pembahasan usulan agenda Joint Commission on bilateral Cooperation (JCBC) ke 5 RI-Norwegia dan rancangan Joint Statement of Ocean Dialogue RI-Norwegia
	10	Pembahasan rencana pembaharuan MoU kerja sama perikanan dan budidaya RI-Hongaria
	11	Penyampaian invitation to discuss tuna farming and tuna fishery potential in Indonesia kepada the Acting Director General of Fisheries and Aquaculture, Ministry of Agriculture and Forestry Republic of Türkiye
	12	Menghadiri kegiatan training in port management and fisheries sector di Port De Boulogne – Sur – Mer Perancis
	13	Pembahasan perkembangan dan rancangan MoU kerja sama kelautan dan perikanan RI-Belanda
Asia dan Pasifik	1	Harmonisasi terhadap ketentuan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS) yang telah berlaku sejak tanggal 1 Desember 2022
	2	Partisipasi BHKLN dalam Courtesy Call KKP dengan pihak Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Indonesia
	3	Penandatanganan Implementing Arrangement (IA) for the Establishment of a Korea-Indonesia Offshore Research Cooperation Center (KIORCC)

Kawasan	No	Kegiatan Tindak Lanjut
		between Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia and Ministry of Fisheries, Republic of Korea
	4	Courtesy Call Dubes Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia dan Delegasi Fuzhou dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
	5	Laporan rapat koordinasi persiapan Joint Commission for Bilateral Cooperation RI-Malaysia dan Annual Consultation RI-Malaysia
	6	Penyampaian tanggapan counterdraft MoU kerja sama kelautan dan perikanan RI-Fiji
	7	Tersedianya final updated Plan of Action (PoA) dari the 2 nd Joint Task Force (JTF) on Connectivity Development between Aceh, Indonesia and Andaman-Nicobar Islands, India (ANI)
	8	Penyampaian perkembangan kondisi perbatasan perairan Indonesia-Vietnam yaitu terdeteksinya kapal ikan berbendera asing berdasarkan data Automatic Identification System (AIS) di Laut Natuna Utara
	9	Perkembangan rancangan the Joint Communique RI-Thailand on Voluntary International Cooperation to Combat IUUF and to Promote Sustainable Fisheries Governance
Afrika dan Timur Tengah	1	Menghadiri Rapat persiapan ekspor perikanan tangkap untuk catering haji di Arab Saudi tahun 2023
	2	Rapat stocktaking upaya mendorong peningkatan kerja sama kelautan dan perikanan RI-Mozambik
	3	Rapat stocktaking langkah-langkah percepatan implementasi MoU kerja sama kelautan dan perikanan RI-Persatuan Emirat Arab

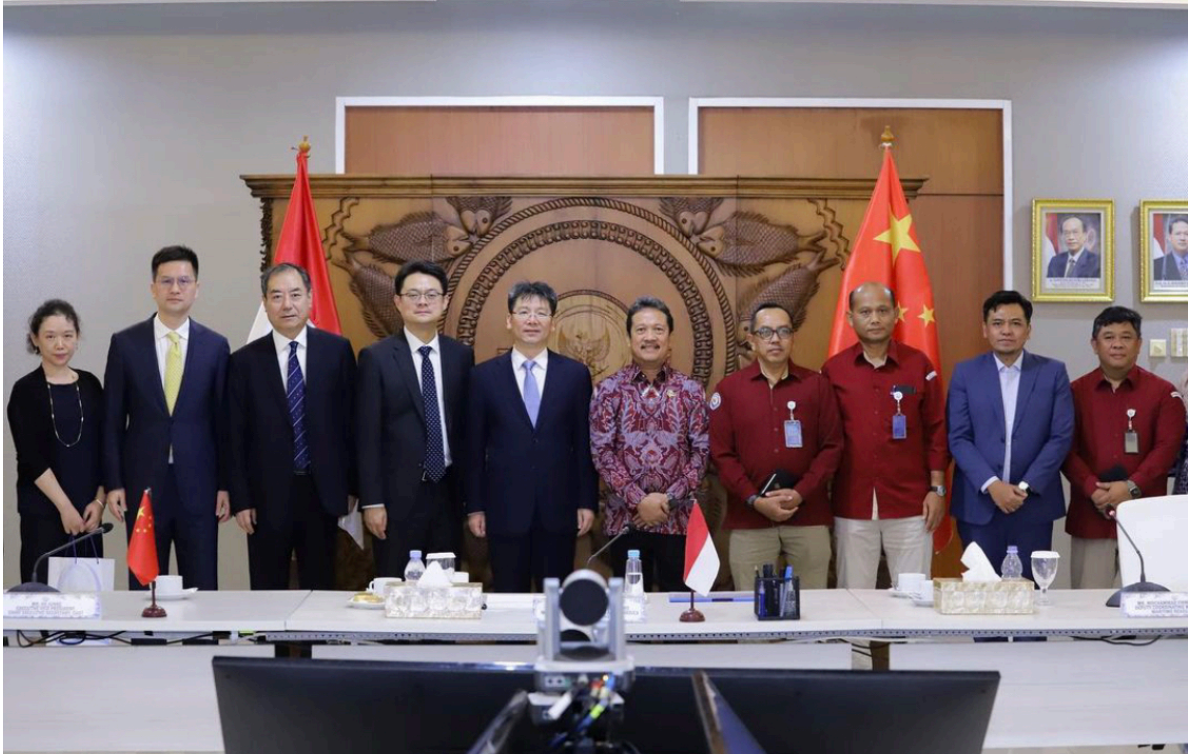
Tabel 22 Bentuk Kegiatan Kerja Sama Bilateral yang Ditindaklanjuti Tahun 2023

IK ini merupakan indikator baru di tahun 2023 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) karena indikator ini baru ditetapkan di tahun 2023. Sedangkan pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang dapat dijadikan acuan oleh BHKLN untuk dijadikan perbandingan.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target, yaitu:

- Upaya tindak lanjut oleh unit kerja eselon I lingkup KKP atas dokumen kerja sama bilateral yang telah disepakati antara Pemri (KKP) dengan negara mitra;
- Tindak lanjut atas kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan ke beberapa negara mitra potensial di tahun 2023 maupun Courtesy Call yang dilakukan oleh negara mitra kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
- Terdapatnya umpan balik yang aktif dari negara mitra, misalnya kerja sama RI-Rusia pasca dilaksanakannya Pertemuan Bilateral RI-Rusia di Jakarta pada tahun 2022.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja, yaitu dengan aktif melakukan koordinasi dengan unit kerja eselon I lingkup KKP untuk melakukan percepatan implementasi terhadap dokumen kesepakatan kerja sama yang telah ditandatangani. Selain itu juga berperan sebagai fasilitator antara unit kerja eselon I dengan negara mitra untuk peninjauan alternatif lain dalam implementasi terhadap dokumen kesepakatan kerja sama yang telah ditandatangani.



Gambar 19 Menteri Kelautan dan Perikanan Bersama Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Melakukan High-Level Meeting Dengan Delegasi China Association for Sciences and Technology (CAST) di Kantor Pusat KKP, 21 November 2023

IK 8 Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan kkp

Untuk mengukur kepuasan layanan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN), dilakukan survei pelayanan kepada pengguna yang telah menerima layanan pengurusan administrasi izin PDLN yang mencakup pengajuan izin PDLN ke Kementerian Sekretariat Negara, pengajuan pembuatan paspor dinas, exit permit, dan rekomendasi visa (bagi PDLN yang memerlukan visa) ke Kementerian Luar Negeri.

Survei tersebut dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner yang dilakukan secara berkala. Adapun responden pengisian kuesioner adalah pelaku PDLN dan narahubung PDLN di unit kerja eselon I terkait lingkup KKP. Untuk mengetahui persentase kepuasan, BHKLN melakukan penyebaran dan pengumpulan kuisisioner secara daring satu kali pada tahun 2023 yakni pada akhir tahun dengan menggunakan aplikasi Google Form.

Sasaran Kegiatan 2 Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kerja sama internasional												
IKK 8 Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP												
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	-	-	-	85%	87,45%	102,88%	-	-	-	-	-

Tabel 23 Rincian Capaian IK Persentase Kepuasan Terhadap Layanan PDLN di Lingkungan KKP

Daftar pertanyaan yang disampaikan dalam kuisisioner adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
- 2) Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
- 3) Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
- 4) Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?
- 5) Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
- 6) Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?
- 7) Bagaimana pendapat Anda tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
- 8) Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana? dan
- 9) Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Setiap responden memberi respon kepada setiap pertanyaan dalam bentuk 4 bentuk jawaban kualitatif. Sebagai contoh, jawaban kualitatif dalam kuisisioner nomor 1 terdiri dari:

- Sangat sesuai
- Sesuai
- Kurang sesuai
- Tidak

Setiap jawaban kualitatif yang diterima kemudian dikonversi menjadi angka mutu, misalnya:

- Sangat sesuai → Angka mutu 4
- Sesuai → Angka mutu 3

- Kurang sesuai → Angka mutu 2
- Tidak → Angka mutu 1

Jumlah responden kuisisioner persentase kepuasan terhadap layanan PDLN di lingkungan KKP yang dikumpulkan di akhir tahun 2023 adalah 77 orang. Responden pengisi kuisisioner adalah pelaku PDLN dan narahubung PDLN di unit kerja eselon I terkait lingkup KKP. Persentase kepuasan terhadap layanan dihitung dengan formula berikut:

$$\% \text{Kepuasan Layanan} = \frac{\text{Jumlah angka mutu hasil survei}}{\text{Jumlah maksimal angka mutu}} \times 100\%$$

Oleh karena jumlah responden sebanyak 77, maka nilai maksimal yang bisa diperoleh adalah:

$$9 \times 4 \times 77 = 2.772$$

Hasil survei menunjukkan jumlah angka mutu untuk setiap pertanyaan dari semua responden:

- Pertanyaan 1 = 265
- Pertanyaan 2 = 262
- Pertanyaan 3 = 260
- Pertanyaan 4 = 298
- Pertanyaan 5 = 258
- Pertanyaan 6 = 263
- Pertanyaan 7 = 263
- Pertanyaan 8 = 256
- Pertanyaan 9 = 299

$$\text{Jumlah angka mutu hasil survei} = 265 + 262 + 260 + 298 + 258 + 263 + 263 + 256 + 299 = \mathbf{2.424}$$

Dengan demikian

$$\% \text{Kepuasan Layanan} = \frac{\text{Jumlah angka mutu hasil survei}}{\text{Jumlah maksimal angka mutu}} \times 100\% = \frac{2.424}{2.772} \times 100\% = 87,45\%$$

Hasil pengolahan atas kuisisioner persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri melalui metode survei menunjukkan bahwa realisasi IK persentase kepuasan terhadap layanan PDLN di lingkungan KKP adalah sebesar 87,45%. Kuisisioner juga menghimpun umpan balik dari para responden dalam bentuk saran atau masukan guna perbaikan layanan PDLN oleh BHKLN ke depannya. Oleh karena

target IK ini di tahun 2023 sebesar 85% maka persentase capaian IK ini di tahun 2023 sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{87,45\%}{85\%} \times 100\% = 102,88\%$$

IK ini merupakan indikator baru di tahun 2023 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) karena indikator ini baru ditetapkan di tahun 2023. Sedangkan pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang dapat dijadikan acuan oleh BHKLN untuk dijadikan perbandingan.

% Kepuasan Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	Tidak Puas
65,00 – 76,60	Kurang Puas
76,61 – 88,30	Puas
88,31 – 100,00	Sangat Puas

Tabel 24 Tingkat Kepuasan Layanan PDLN di Lingkungan KKP

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah **sangat puas** karena persentase kepuasan berada dalam rentang antara 88,31% sampai dengan 100%. Data mentah dan hasil pengolahan terhadap survei kepuasan terhadap layanan PDLN di lingkungan KKP dapat dilihat dalam tautan <https://bit.ly/3RMn853>.

IK 9 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

Sebagaimana yang telah disampaikan pada IK sebelumnya, berdasarkan hasil rapat validasi IK pada tanggal 27 November 2022 bersama dengan Biro Perencanaan dan Inspektorat I, terdapat rekomendasi agar dilakukan pemisahan IK yang semula hanya

“Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama” menjadi 2 IK sebagai berikut.

1. Persentase dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti; dan
2. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional.

Sebelum menghadiri pertemuan internasional, Delegasi RI (Delri) wajib menyusun Pedoman Delri agar tercipta keseragaman posisi Delri dan koordinasi antar K/L. Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri yang didelegasikan kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pedoman Delri tersebut memuat posisi/rekomendasi/ prakarsa Indonesia terhadap isu yang dibahas di forum internasional dan Delri memperjuangkan posisi Indonesia untuk dapat diadopsi dalam laporan forum internasional tersebut.

Pengaruh dan peran Indonesia dalam suatu forum internasional dapat dilihat dari persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia yang diterima dalam forum internasional tersebut. Diterimanya posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia juga menunjukkan bahwa Delri dapat menyuarakan kepentingan nasional di level internasional. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah kepentingan di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dijabarkan salah satunya dalam bentuk program prioritas kementerian.

- Posisi adalah kedudukan/pandangan/kepentingan RI dalam pembahasan suatu agenda/isu di forum internasional.
- Rekomendasi adalah usulan dalam menanggapi/menindaklanjuti/merespons suatu isu tertentu yang dibahas dalam forum internasional yang menjadi kepentingan Indonesia.
- Prakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam forum internasional. Penyampaian gagasan tersebut harus dapat memberikan bobot kepada kepemimpinan Indonesia dalam kerangka kerja multilateral.
- Diterima adalah dicatatnya/dicantumkannya/disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang/pertemuan internasional.

Laporan dan dokumen sidang dapat berbentuk *leaders' vision*, *chairman's statement*, *joint statement*, *joint communique*, *declaration*, *laporan Delri*, *agreements*, *MoU's*, *summary record of discussion (RoD)*, *PoA*, *treaty*, *resolution*, *charter*, *Terms of References (ToR)*, *Rules of Procedures (RoP)*, *blue print*, *policy recommendation*, *non-paper/note* dan *concept paper/note*, *framework of cooperation*, *element of working document*, atau *work plan/program*.

Sasaran Kegiatan 2 Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kerja sama internasional												
ik 9 persentase posisi/rekomendasi/prakarsa indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional												
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	-	-	-	92%	100%	108,7%	-	-	-	-	-

Tabel 25 Rincian Capaian IK Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diterima di Forum Internasional

IK ini merupakan indikator baru di tahun 2023 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) karena indikator ini baru ditetapkan di tahun 2023. Sedangkan pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang dapat dijadikan acuan oleh Biro Humas dan KLN untuk dijadikan perbandingan.

Formula penghitungan realisasi IK sebagai berikut.

$$\% \text{ KS Regional dan Multilateral} = \frac{\text{Jumlah posisi atau rekomendasi atau prakarsa yang diterima}}{\text{Jumlah posisi atau rekomendasi atau prakarsa yang diusulkan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah posisi atau rekomendasi atau prakarsa yang diterima = Dokumen posisi/rekomendasi/prakarsa yang direncanakan akan diikuti oleh KKP dan diterima di forum internasional; dan
- Jumlah posisi atau rekomendasi atau prakarsa yang diusulkan = Dokumen posisi/rekomendasi/prakarsa yang direncanakan akan diikuti oleh KKP.

No	Organisasi Internasional	Target	Realisasi	% Capaian
1	Regional	11	11	100,00%
2	Intrakawasan	11	11	100,00%
3	Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	11	11	100,00%
	Jumlah	33	33	100,00%
Target Tahun 2023				92%
% Capaian Tahun 2023				108,70%

Tabel 26 Persentase Capaian Kinerja Kerja Sama Regional dan Multilateral per Kawasan Tahun 2023

Realisasi kegiatan kerja sama regional dan multilateral oleh BHKLN sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Organisasi Internasional	No	Posisi/Rekomendasi/Prakarsa yang Diterima
Regional	1	Pedoman Delri untuk Pertemuan 16 th Strategic Planning Meeting (SPM) IMT-GT Working Group on Agriculture and Agrobased Industry Breakout Session Meeting

Organisasi Internasional	No	Posisi/Rekomendasi/Prakarsa yang Diterima
	2	Pedoman Delri dan kertas posisi pada the 55 th Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) Council Director Meeting
	3	Document of Outline of Common Understanding and Initiative on Sustainable Small-Scale Aquaculture: Enhancing Awareness Among Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Countries on the Importance of Small-Scale Aquaculture
	4	Kertas posisi untuk the 15 th Meeting of the ASEAN Fisheries Consultative Forum
	5	Kertas posisi untuk the 31 st ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries
	6	Laporan rangkaian Pertemuan Special Senior Officials Meetig (SOM)-44 ASEAN Ministers Meeting on Agriculture and Forestry (AMAF) tahun 2023
	7	Kertas posisi RI untuk the 30 th ASEAN Joint Committee on Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme (30 th ASEAN JCM)
	8	Kertas posisi Delri pada the 10 th Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asia Growth Area (BIMP-EAGA) Fisheries Cooperation Working Group Meeting
	9	Pedoman Delri pada rangkaian Pertemuan the 45 th AMAF
	10	Pedoman Delri pada Pertemuan SEAFDEC Program Committee Meeting (PCM) ke-46
	11	Kertas posisi RI pada Pertemuan Fisheries Consultative Group (FCG) ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (ASSP) ke-26
	Intrakawasan	1
2		Forum G20: Pembuatan kertas posisi Indonesia untuk G20 Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG)
3		Diterimanya pemutakhiran kemajuan pelaksanaan (progres) komitmen lama Indonesia di Our Ocean Conference (OOC) pada the 8 th OOC
4		Laporan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku national Focal Point Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) klaster environment dalam kegiatan the 2 nd Round of IPEF Pillar I Trade – Cluster Environment
5		Tersedia dan diterimanya bahan masukan KKP untuk pengisian kuesioner G20 dalam upaya mewujudkan Blue Economy yang berkelanjutan dan tangguh pada Forum G-20 ECSWG India 2023

Organisasi Internasional	No	Posisi/Rekomendasi/Prakarsa yang Diterima
	6	Kertas posisi Delri untuk the 3 rd Meeting of the Indian Ocean Rim Association (IORA) Core Group on Fisheries Management (CGFM)
	7	Kertas Posisi Indonesia untuk the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF), Monitoring and Evaluation Working Group (MEWG)
	8	Kertas posisi pada Regional Steering Committee (RSC) ke-5 of the Second phase of the Arafura & Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA-2) Programme
	9	Laporan workshop pelaksanaan 3 APEC Project Indonesia di APEC (Determining Microplastics Distribution in Coastal Aquaculture Input Systems; Capacity Building on Vessel Innovation to Combat Marine Debris; and APEC Workshop of Fisheries Enforcement Strategies to Prevent, Combat and Deter Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) Related to Covid-19 Pandemic)
	10	Kertas posisi Delri pada CTI-CFF, the 18 th Pre-Senior Officials Meeting (SOM) and SOM
	11	Pedoman Delri pada rangkaian pertemuan menuju Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 (pemukhiran posisi nasional untuk perundingan World Trade Organization (WTO) Fisheries Subsidies Agreement (FSA) phase 2 (overfishing, overcapacity)
PBB	1	Pembuatan Pedoman Delri dan penyampaian kertas posisi Indonesia dalam forum BBNJ: Intergovernmental conference on an international legally binding instrument under the United Nations (UN) Convention on the Law of the Sea on the conservation and Sustainable Use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction
	2	Pembuatan pedoman Delri untuk Intergovernmental Technical Working Group on Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture ke-4
	3	Pedoman Delri/kertas posisi untuk the 4 th MoP PSMA
	4	Pedoman Delri/kertas posisi untuk the 12 th Session of Committee on Fisheries (COFI) Sub-Committee on Aquaculture
	5	Pedoman Delri pada the 79 th Session of the UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
	6	Kertas posisi pada the 107 th Session of Maritime Safety Committee
	7	Panduan Delri pada the 37 th Session of the Asia-Pacific Fishery Commission (APFIC)
	8	Pedoman Delri/kertas posisi untuk the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) on its 58 th Session

Organisasi Internasional	No	Posisi/Rekomendasi/Prakarsa yang Diterima
	9	Panduan Delegasi RI pada the 19 th Session of COFI Sub-Committee on Fish Trade
	10	Pedoman Delri pada the 1 st Archipelagic and Island States (AIS) Forum dan Leaders' Joint Declaration
	11	Pedoman Delri pada the Conference of the Parties (COP) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) on its 28 th Session

Tabel 27 Posisi/Rekomendasi/Prakarsa di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diterima di Forum Internasional Tahun 2023

Faktor utama pendukung keberhasilan tercapainya target, yaitu keterlibatan aktif unit kerja eselon I lingkup KKP dalam mengawal posisi pada seluruh sidang/forum internasional di bidang kelautan dan perikanan. Upaya untuk mempertahankan capaian pada tahun berikutnya, yaitu dengan tetap melakukan koordinasi intensif dengan unit kerja eselon I lingkup KKP sebagai unit kerja yang akan melaksanakan keputusan dari sidang/forum internasional tersebut.



Gambar 20 The 4th MoP PSMA di Bali, 8-12 Mei 2023

IK 10 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

Kepemimpinan pada forum regional/multilateral merupakan upaya strategis Pemri untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan, menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, atau sebagai anggota OI dengan menduduki suatu jabatan strategis pada OI tersebut. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kegiatan dan melaksanakan program kerja OI yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia.

Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi Focal Point OI tersebut, dalam hal ini adalah KKP. Forum regional/multilateral adalah organisasi dan pertemuan internasional di tingkat regional/multilateral. OI adalah institusi yang beranggotakan 3 negara berdaulat atau lebih.

Sasaran Kegiatan 2 Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kerja sama internasional													
IK 10 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan													
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024	
-	-	-	-	-	92%	100%	108,7%	-	-	-	-	-	

Tabel 28 Rincian Capaian IK Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Regional dan Multilateral di bidang Kelautan dan Perikanan

IK ini merupakan indikator baru di tahun 2023 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) karena indikator ini baru ditetapkan di tahun 2023. Sedangkan pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang dapat dijadikan acuan oleh BHKLN untuk dijadikan perbandingan.

Formula atau rumus penghitungan realisasi IK berdasarkan manual IK, yaitu:

$$\% \text{Kepemimpinan} = \frac{\text{Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia}}{\text{Rencana jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia}} \times 100\%$$

Rencana jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia sepanjang tahun 2023 sebanyak 11 kali yang terbagi sebagai berikut.

Triwulan I = 0 kali

Triwulan II = 1 kali

Triwulan III = 0 kali

Triwulan IV = 10 kali

Kegiatan kerja sama luar negeri regional dan multilateral bidang kelautan dan perikanan yang telah rampung di tahun 2023 dimana delegasi Indonesia terlibat sebagai pemimpin atau bagian dari kepemimpinan adalah sebagai berikut:

1. The 4th MoP PSMA (8 Mei 2023);
2. The 3rd Meeting of IORA CGFM (12 September 2023);
3. The 1st IORA Workshop on Illegal Unregulated Unreported Fishing (IUUF) (12 September 2023);
4. The 5th Ministerial Meeting AIS Forum (10 Oktober 2023);
5. APEC OFWG Symposium on Vessel Innovation (18-20 Oktober 2023);
6. The 5th RSC ATSEA-2 (21-22 November 2023);
7. The 46th SEAFDEC PCM (20 November 2023);
8. The 26th FCG ASSP (20 November 2023);
9. SEAFDEC Department Chiefs Meeting (25 November 2023);
10. APEC OFWG Workshop on Determining Microplastics Distribution in Coastal Aquaculture Input Systems and Developing a Mitigation Plan towards Seafood Safety Microplastic (8-10 November 2023); dan
11. APEC Workshop on Fisheries Enforcement Strategies to Prevent, Combat and Deter IUUF related to COVID-19 Pandemic (15 November 2023).

Realisasi IK ini adalah sebagai berikut.

$$\% \text{Kepemimpinan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target IK 2023 sebesar 92% maka persentase capaian sebesar

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{92\%} \times 100\% = 108,70\%$$

Faktor utama pendukung keberhasilan tercapainya target, yaitu penyelenggaraan forum internasional yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dilaksanakan sehingga perwakilan Indonesia dapat memimpin forum internasional tersebut. Upaya untuk mempertahankan capaian pada tahun berikutnya, yaitu:

- Jika Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum internasional = Melakukan persiapan dengan seluruh pihak, seperti K/L terkait dan Pemda lokasi penyelenggaraan forum internasional tersebut.
- Jika Indonesia memimpin forum internasional = Memastikan penyelenggaraan forum internasional tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dilaksanakan. Jika penyelenggaraan ditunda, agar mampu mendorong penyelenggaraan forum internasional tersebut di tahun yang sama.



Gambar 21 Kepala BHKLN Memberikan Keynote Speech pada APEC Workshop on Fisheries Enforcement Strategies to Prevent Combat and Deter IUUF Related to Covid-19 pandemic di Banten, 15 November 2023

IK 11 Indeks profesionalitas ASN BHKLN

Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dalam pelaksanaannya pengukuran dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam pedoman tersebut diatur bobot pengukuran setiap dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi kualifikasi (25%): mengukur kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
2. Dimensi kompetensi (40%) : mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
3. Dimensi kinerja (30%): mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;
4. Dimensi disiplin (5%) dengan kriteria: (a) nilai 5 bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; (b) nilai 3 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; (c) nilai 2 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan (d) nilai 1 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Dimensi Kualifikasi

Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data kualifikasi pendidikan formal PNS paling tinggi sampai yang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari seluruh pengukuran. Pada dimensi ini perlu diketahui bobot nilai dari indikator pengukuran berdasarkan kualifikasi pendidikan, yaitu:

- Pendidikan di bawah SLTA sederajat diperhitungkan sebesar 1%;
- Pendidikan SLTA, D1 dan D2 sederajat diperhitungkan sebesar 5%;
- Pendidikan D3 diperhitungkan sebesar 10%;
- Pendidikan D4 dan S1 diperhitungkan sebesar 15%;
- Pendidikan S2 diperhitungkan sebesar 20%; dan
- Pendidikan S3 diperhitungkan sebesar 25%.

Dimensi Kompetensi

Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data atau informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatan dimensi. Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari seluruh pengukuran. Adapun secara singkat, perhitungan 40% dengan rincian indikator sebagai berikut:

- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) saat ini Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bagi pejabat struktural atau Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) fungsional bagi jabatan fungsional memiliki perhitungan sebesar 15%;
- Diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun memiliki perhitungan sebesar 15%; dan
- Workshop, seminar atau sejenisnya memiliki perhitungan sebesar 10%.

Dimensi Kinerja

Dimensi kinerja digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Dimensi ini diperhitungkan sebesar 30% dari seluruh pengukuran, dengan rincian indikator sebagai berikut:

- Nilai capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 50 ke bawah atau buruk memiliki perhitungan sebesar 1%;
- Nilai SKP 51-60 kurang memiliki perhitungan sebesar 5%;
- Nilai SKP 61-75 cukup memiliki perhitungan sebesar 10%;
- Nilai SKP 76-90 baik memiliki perhitungan sebesar 15%;
- Nilai 91-100 sangat baik memiliki perhitungan sebesar 20%.

Dimensi Disiplin

Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data atau informasi lainnya memuat hukuman yang telah diterima PNS, dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari seluruh pengukuran. Data pada dimensi disiplin ini diperoleh dari aplikasi e-pegawai KKP dengan ketentuan data yang diambil yaitu data hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir. Adapun komponen perhitungannya, yaitu:

- Pegawai pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat memiliki perhitungan sebesar 1%;
- Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang memiliki perhitungan sebesar 2%;
- Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat memiliki perhitungan sebesar 3%; dan
- Pegawai yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun berat, memiliki perhitungan sebesar 5%.

Tingkat Profesionalitas ASN dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut.

- Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
- Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
- Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
- Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional); dan
- Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya layanan dokumen manajemen yang baik lingkup BHKLN												
IK 11 Indeks profesionalitas ASN BHKLN												
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	69,74	54,95	77,53	79,29	79	84,45	106,90%	6,51%	75	112,60%	76	111,12%

Tabel 29 Rincian Capaian IK IP ASN BHKLN

Mengacu pada Memorandum Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Organisasi Nomor: 85/SJ.3/KP.720/I/2024, Tanggal: 11 Januari 2024, Hal: Capaian Indikator Kinerja Utama IP ASN Triwulan IV Semester II Tahun 2023 dan Target IP ASN Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024, BHKLN memperoleh nilai IP ASN tahun 2023 sebesar 84,45. Jika mengacu pada target sebesar 79 maka target tahun 2023 telah tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya terdapat fluktuasi capaian. Pada tahun 2019 capaian sebesar 69,74 kemudian turun di tahun 2020 dan naik secara terus menerus pada tahun 2021 hingga 2023 dengan capaian tertinggi sebesar 84,45. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 75 di tahun 2023 dan 76 di tahun 2024 maka target tersebut telah tercapai. Adapun capaian atas IK ini di lingkup Setjen dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	22.50	12.50	25.00	5	65.00
2	Biro Perencanaan	21.43	35.00	25.75	5	87.19
3	Biro SDM Aparatur dan Organisasi	20.90	32.33	25.08	5	83.31
4	Biro Hukum	21.71	38.50	24.43	5	89.64
5	Biro HKLN	21.36	33.09	25.00	5	84.45
6	Biro Keuangan	21.10	38.39	25.00	5	89.49
7	Biro Umum dan PBJ	20.97	36.08	24.82	5	86.87
8	Pusdatin	21.09	39.34	25.07	5	90.50
9	BPISKP	22.38	35.47	23.44	5	86.28

Tabel 30 Capaian IK IP ASN Lingkup Setjen

Beberapa hal yang mendukung capaian BHKLN, yaitu:

- a. Melakukan pemutakhiran data pendidikan terakhir untuk meningkatkan aspek kualifikasi;
- b. Mengusulkan pejabat yang belum mengikuti Diklat fungsional khususnya yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu;
- c. Mengusulkan penyelenggaraan pelatihan secara virtual melalui aplikasi e-learning; dan
- d. Monev penilaian prestasi kerja pegawai.

Sebagai upaya perbaikan di tahun berikutnya, beberapa hal yang akan ditempuh oleh BHKLN, adalah sebagai berikut.

- a. Penyampaian imbauan melalui grup aplikasi WhatsApp agar seluruh ASN BHKLN melakukan pemutakhiran data pelatihan (seperti seminar, webinar dan kegiatan sejenis lainnya) melalui akun [epegawai.kkp.go.id](https://www.kkp.go.id) masing-masing ASN;
- b. Memberikan asistensi atau pendampingan kepada ASN BHKLN terkait cara pengisian data Diklat di akun masing-masing ASN;

- c. Berbagi informasi di grup aplikasi WhatsApp BHKLN tentang brosur atau poster rencana penyelenggaraan webinar, seminar dan lain sebagainya sehingga bisa diikuti ASN BHKLN dalam rangka menambah wawasan dan kapasitas.

IK 12 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BHKLN

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 5 jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK, yakni:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika LK dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika LK diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
2. WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal.
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam LK bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LK secara keseluruhan.

4. Opini Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika LK mengandung salah saji material, atau dengan kata lain LK tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika LK mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini LK perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna LK dalam pengambilan keputusan.
5. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah LK wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya layanan dokumen manajemen yang baik lingkup BHKLN												
IK 12 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BHKLN												
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%

Tabel 31 Rincian Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BHKLN

Mengacu pada Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor: 1717/SJ.2/RC.610/X/2023, Tanggal: 12 Oktober 2023, Hal: Capaian IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2022, BHKLN mendapatkan nilai 100%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya dapat disampaikan bahwa terdapat konsistensi terhadap komitmen penyelesaian temuan BPK dari tahun 2018 hingga tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100% baik di tahun 2023 maupun di tahun 2024, maka target tersebut juga telah tercapai. Adapun capaian atas IK ini di lingkup Setjen dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

No.	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Biro Umum dan PBJ	475.510.832.637	68.482.499,00	≤1	0,01	100,99
	Biro Umum dan PBJ	-	38.200.599,00	≤1	0,01	100,99
	Biro Perencanaan	-	-	≤1	0,00	0
	Biro Keuangan	-	30.281.900,00	≤1	0,01	100,99
	Biro Hukum	-	-	≤1	0,00	0
	Biro SDMAO	-	-	≤1	0,00	0
	Biro Humas dan KLN	-	-	≤1	0,00	0
	Pusdatin	-	-	≤1	0,00	0
2.	LPMUKP	41.467.114.758	-	≤1	0,00	101,00
3.	DEKONSENTRASI	5.873.164.774	-	≤1	0,00	101,00
	TOTAL	522.851.112.169,00	68.482.499,00	≤1	0,01	100,99

Tabel 32 Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Setjen

Beberapa hal yang dilakukan oleh BHKLN sepanjang tahun 2023 dalam mendukung pencapaian target IK ini, yaitu menyusun LK sesuai standar akuntansi pemerintah, melakukan reviu terhadap LK, menyelesaikan catatan reviu LK dan rekonsiliasi data Barang Milik Negara (BMN) dan keuangan. Adapun upaya untuk mempertahankan capaian pada tahun berikutnya yaitu dengan melakukan pengendalian intern melalui penilaian risiko atas pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis, menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis dan pemantauan serta evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis tersebut.

IK 13 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BHKLN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Di KKP, unit kerja yang memiliki fungsi dan kewenangan pengawasan intern dan bertanggung jawab kepada pimpinan adalah Inspektorat Jenderal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang sama, Inspektorat Jenderal KKP melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan pimpinan instansi pemerintah memastikan bahwa saran dan rekomendasi aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya sudah dipertimbangkan sepenuhnya dan ditindaklanjuti dengan memperbaiki masalah atau kelemahan yang teridentifikasi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BHKLN merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BHKLN berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP (LHP Audit Reviu dan Evaluasi) baik dalam bentuk surat maupun bab yang terbit pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti dan berstatus tuntas oleh BHKLN yang menjadi objek pengawasan.

Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya layanan dokumen manajemen yang baik lingkup BHKLN												
IK 13 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BHKLN												
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	69%	100%	65%	83,33%	75%	100%	133,33%	20%	75%	133,33%	80%	125%

Tabel 33 Rincian Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BHKLN

Mengacu pada Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor: 86/SJ.2/TU.210/I/2024, Tanggal: 10 Januari 2024, Hal: Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023, jumlah rekomendasi BHKLN sebanyak 1 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti (tuntas), sehingga capaian BHKLN sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya terdapat fluktuasi capaian. Pada tahun 2019 capaian sebesar 69% kemudian naik di tahun 2020 dan turun Kembali di tahun 2021 dengan capaian sebesar 65%. Di tahun 2022 kembali naik dengan capaian sebesar 83,33% dan pada tahun 2023 dengan capaian tertinggi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 75% di tahun 2023 dan sebesar 80% di tahun 2024, maka target tersebut telah tercapai sepenuhnya. Adapun capaian atas IK ini di lingkup Setjen dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

No.	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1.	Biro Perencanaan	10	10	100,00	0	00,00
2.	Biro Keuangan	12	12	100,00	0	00,00
3.	Biro Umum dan PBJ	18	18	100,00	0	00,00
4.	Biro Hukum	16	16	100,00	0	00,00
5.	Biro SDMAO	24	24	100,00	0	00,00
6.	Biro Humas dan KLN	1	1	100,00	0	00,00
7.	PUSDATIN	7	7	100,00	0	00,00
8.	LPMUKP	25	24	96,00	1	04,00
9.	BPISDKP	0	0	100,00	0	00,00
TOTAL		113	112	99,12	1	00,88

Tabel 34 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen

Faktor utama pendukung tercapainya target pada IK ini, yaitu dengan menyusun rencana tindak lanjut yang disertai dengan jadwal pelaksanaan atas rencana tindak

lanjut tersebut. Selain itu juga dengan melakukan pertemuan rutin untuk memantau progres penyelesaian atas rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti. Adapun upaya yang dapat ditempuh untuk mempertahankan capaian pada tahun berikutnya, yaitu dengan melakukan pengawasan internal secara berkala sehingga tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti.

IK 14 Nilai penilaian mandiri SAKIP BHKLN

Nilai PM SAKIP BHKLN merupakan IK yang menggantikan IK nilai rekonsiliasi kinerja. PM dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan ruang lingkup evaluasi mencakup:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- c) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya layanan dokumen manajemen yang baik lingkup BHKLN												
IK 14 Nilai penilaian mandiri SAKIP BHKLN												
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	-	-	-	80,5	83,30%	103,48%	-	-	-	-	-

Tabel 35 Rincian Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BHKLN

PM level II lingkup Setjen telah dilakukan bersama dengan Inspektorat I dengan melakukan verifikasi terhadap 4 komponen penilaian evaluasi SAKIP dengan menggunakan aplikasi kinerjaku yang memiliki bobot masing-masing komponen.

Hasil verifikasi terangkum dalam matriks komponen dan bobot penilaian sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja	6	9	15	30
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3	4,5	7,5	15
Nilai Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25
Total	20	30	50	100

Tabel 36 Bobot Penilaian Mandiri SAKIP

Berdasarkan penilaian di tahun 2023, Nilai PM SAKIP BHKLN mencapai 83,30 dengan kategori A predikat memuaskan. Nilai ini diperoleh berdasarkan Memorandum Biro Perencanaan Nomor: 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023, Tanggal: 14 Desember 2023, Hal: Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun. IK ini merupakan indikator baru di tahun 2023 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) karena indikator ini baru ditetapkan di tahun 2023.

Adapun capaian atas IK ini di lingkup Setjen dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

No	Unit Kerja	Nilai Akuntabilitas					Predikat
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	
1	Biro Perencanaan	27,60	24,00	13,80	20,00	85,40	A
2	Biro SDMAO	25,80	24,60	13,80	20,50	84,70	A
3	Biro Hukum	27,00	24,60	13,50	22,50	87,60	A
4	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri	25,20	24,00	11,10	23,00	83,30	A
5	Biro Keuangan	27,00	24,00	12,00	22,50	85,50	A
6	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	24,60	23,70	12,75	19,25	80,30	A
7	Pusat Data, Statistik, dan Informasi	27,90	24,00	12,75	22,50	87,15	A
8	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP	25,20	24,00	12,60	22,50	84,30	A
9	Lembaga Pengelola Modal Usaha KP	22,20	22,80	11,10	18,50	74,60	BB

Tabel 37 Capaian IK Nilai PM SAKIP Lingkup Setjen

Kategori penilaian SAKIP sebagai berikut.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Tabel 38 Kategori Penilaian SAKIP

Tercapainya target pada IK ini didukung oleh pertemuan rutin internal BHKLN yang dilaksanakan saat penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pemantauan atas capaian target kinerja yang dilakukan secara triwulanan untuk membahas capaian kinerja serta penyusunan rencana tindak lanjut atas evaluasi kinerja secara berkala.

Adapun upaya perbaikan atas implementasi SAKIP yang dapat dilakukan, yaitu:

- a) Mendorong penyempurnaan perencanaan kinerja untuk lebih memastikan adanya keselarasan perencanaan kinerja antara Renstra, Renja dan PK, merumuskan tujuan dan sasaran yang berorientasi outcome pada level kinerjanya dan IK yang lebih Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound (SMART) untuk mengukur keberhasilan kinerja yang ditetapkan dan menetapkan target kinerja yang lebih realistis dan achievable;
- b) Mereviu kembali penjenjangan kinerja untuk memastikan hubungan antara level kinerja disusun dengan mempertimbangkan Critical Succes Factor (CSF) dengan cara memastikan tidak terjadi penetapan kinerja yang berulang antar level kinerja, sehingga hubungan antar level kinerja dapat terbentuk sebab-akibatnya;
- c) Memastikan perumusan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi dengan menyusun matrik pembagian peran hasil dan memastikan hasil matriks tersebut dituangkan dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi;
- d) Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perbaikan program/kegiatan untuk perencanaan kedepan sehingga mengoptimalkan peningkatan capaian kinerja yang ditetapkan;
- e) Mendorong komitmen pimpinan untuk memanfaatkan aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai sarana Monev secara efektif dengan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling pimpinan unit kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;
- f) Meningkatkan kualitas LKj, dengan menyajikan informasi detail pencapaian kinerja terkait analisa upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan sehingga LKj dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja kedepan;

- g) Mendorong pemanfaatan data kinerja pada LKj untuk perbaikan penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja kedepan dapat menggambarkan adanya perbaikan/peningkatan kinerja;
- h) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan/peningkatan kinerja; dan
- i) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.

IK 15 Persentase penyerapan anggaran BHKLN

Capaian atas IK ini diperoleh dari aplikasi SAKTI yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak dua kali refocusing anggaran di BHKLN sehingga anggaran yang semula sebesar Rp 36.235.315.000 menjadi Rp 24.281.262.000. Adapun realisasi anggaran BHKLN pada tahun 2023 sebesar Rp 24.125.714.981 atau sebesar 99,36% dari pagu anggaran setelah refocusing sehingga capaian BHKLN untuk IK ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya layanan dokumen manajemen yang baik lingkup BHKLN													
IK 15 Persentase penyerapan anggaran BHKLN													
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024	
-	-	-	-	98,68%	95%	99,36%	104,59%	0,69%	-	-	-	-	

Tabel 39 Rincian Capaian IK Persentase Penyerapan Anggaran BHKLN

Mengacu pada Memorandum Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Nomor: 161/SJ.6/RC/510/I/2024, Tanggal: 15 Januari 2024, Hal: Capaian Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran TA 2023, adapun capaian atas IK ini di lingkup Setjen dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

UNIT ESELON II	PAGU	REALISASI	SISA DANA	%
Biro Perencanaan	108,496,211,000	108,158,685,936	337,525,064	99.69
Biro Hukum	13,001,664,000	12,912,457,558	89,206,442	99.31
BHKLN	24,281,262,000	24,125,714,981	155,547,019	99.36
Biro Keuangan	12,737,230,000	12,655,154,252	82,075,748	99.36
Biro SDMAO	14,609,428,000	14,388,513,128	220,914,872	98.49
Biro Umum dan PBJ	280,497,365,000	278,288,469,415	2,208,895,585	99.21
Pusdatin	115,753,575,000	114,753,744,705	999,830,295	99.14
TOTAL	569,376,735,000	565,282,739,975	4,093,995,025	99.28

Tabel 40 Capaian IK Persentase Penyerapan Anggaran Lingkup Setjen

Faktor pendorong tercapainya target IK ini, yaitu komitmen seluruh pihak di BHKLN dalam pelaksanaan anggaran dengan mengacu pada Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah ditetapkan. Selain itu juga pemantauan dilaksanakan secara berkala (bulanan) pada triwulan I s.d. III sedangkan pada triwulan IV dilakukan secara mingguan. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian di tahun berikutnya, yaitu kegiatan yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh BHKLN (kecuali yang terikat dengan jadwal pelaksanaan kegiatan internasional) agar dapat dilaksanakan pada triwulan II atau triwulan III.

IK ini merupakan IK baru di tahun 2022 sehingga perbandingan hanya bisa dilakukan mulai tahun 2022. Target jangka menengah untuk IK ini belum diamanatkan pada Renstra Setjen sehingga tidak dapat dibandingkan.

IK 16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri

Pada tahun ini, BHKLN mengusulkan 1 Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka menunjang pelayanan baik kepada publik (pihak eksternal) maupun internal KKP. Adapun Rancangan Peraturan Menteri tersebut, yaitu revisi atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya layanan dokumen manajemen yang baik lingkup BHKLN												
IK 16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri												
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	0%	-	-	-	-

Tabel 41 Rincian Capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor: 29/SJ.4/TU.210/I/2024, Tanggal: 2 Januari 2023, Hal: Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Semester II, capaian BHKLN untuk IK ini, sebesar 100% sama dengan capaian pada tahun 2022. Target jangka menengah untuk IK ini belum diamanatkan pada Renstra

Setjen sehingga tidak dapat dibandingkan. Adapun capaian atas IK ini di lingkup KKP dan Setjen dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

No	Unit Kerja	Target Semester II		Capaian Semester II	
		Permen/Kepmen	Persentase	Permen/Kepmen	Persentase
1	Set. Ditjen PRL	13	100.00%	13	100.00%
2	Set. Ditjen PT	4	100.00%	4	100.00%
3	Set. Ditjen PB	5	100.00%	5	100.00%
4	Set. Ditjen PDSPKP	7	100.00%	7	100.00%
5	Set. Ditjen PSDKP	6	100.00%	6	100.00%
6	Set. Itjen	-	-	-	-
7	Set. BRSDM KP	6	100.00%	6	100.00%
8	Set. BKIPM	7	100.00%	7	100.00%
9	Biro Perencanaan	6	100.00%	6	100.00%
10	Biro Keuangan	3	100.00%	3	100.00%
11	Biro SDMAO	6	100.00%	6	100.00%
12	Biro Hukum	1	100.00%	1	100%
13	Biro HKLN	1	100.00%	1	100%
14	Biro Umum dan PBJ	-	-	-	-
15	Pusdatin	6	100.00%	6	100%

Tabel 42 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup KKP

Adapun peraturan perundang-undangan yang tercapai, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023. Tercapainya target pada IK ini didorong oleh keterlibatan aktif unit kerja terkait di lingkungan KKP dalam rapat-rapat pembahasan penyusunan peraturan ini. Untuk tahun 2024, BHKLN tidak mengajukan penyusunan peraturan perundang-undangan.

IK 17 Persentase unit kerja BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan dalam bentuk tacit knowledge untuk diketahui, dipelajari dan digunakan kembali oleh pegawai lainnya terutama pada saat pegawai yang sudah berbagi pengetahuan tersebut tidak lagi berada dalam organisasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, keberadaan pengetahuan baik yang bersifat eksplisit dan tacit diyakini turut memberikan gambaran besar dari pencapaian hasil pembangunan kelautan dan perikanan. Data dan informasi yang terkandung dalam pengetahuan tersebut dapat menjadi acuan untuk menentukan arah kebijakan serta digunakan sebagai ukuran dari hasil yang direncanakan tercapai pada masa mendatang. Dengan demikian, sistem manajemen pengetahuan dapat membantu penyusunan arah dan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan optimal, efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian komponen keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Collaboration Office. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud antara lain:

1. Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H (What, Who, Why, Where, When, How) dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5.
2. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.
3. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya layanan dokumen manajemen yang baik lingkup BHKLN												
IK 17 Persentase unit kerja BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar												
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024
98,47%	100%	100%	93,98%	100%	92%	133,33%	144,92%	33,33%	88%	151,51%	90%	148,14%

Tabel 43 Rincian Capaian IK Persentase Unit Kerja BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Berdasarkan Memorandum Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor: 20/SJ.7/TU.210/I/2024, Tanggal: 3 Januari 2024, Hal: Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2023, BHKLN mendapatkan nilai capaian sebesar 133,33. Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya terdapat fluktuasi capaian. Pada tahun 2018 capaian sebesar 98,47% kemudian memperoleh nilai maksimal sebesar 100% di tahun 2019 dan 2020. Kemudian di tahun 2021 turun menjadi 93,98% dan naik Kembali di tahun 2022 dan 2023. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 88% di tahun 2023 dan sebesar 90% di tahun 2024, maka target tersebut telah tercapai sepenuhnya.

Adapun capaian atas IK ini di lingkup Setjen dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

No	Satuan Kerja	Triwulan				Capaian	Target	% Capaian
		I	II	III	IV			
1	Biro Perencanaan	100,00	100,00	116,67	133,33	112,50	92,00	122,28
2	BHKLN	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
3	Biro Keuangan	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
4	BSDMAO	100,00	99,68	100,00	133,33	108,25	92,00	117,67
5	Biro Hukum	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
6	Biro Umum dan PBJ	92,59	98,25	100,00	133,33	106,04	92,00	115,26
7	Pusdatin	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
8	LPMUKP	100,00	100,00	100,00	133,33	108,33	92,00	117,75

Tabel 44 Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen

Faktor utama tercapainya target IK ini, yaitu peran aktif dari Tim Pengelola Kinerja BHKLN untuk mengingatkan progres pencapaian target IK ini pada forum pertemuan yang dilaksanakan setiap bulan di internal BHKLN. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian di tahun 2024 yaitu dengan tetap melakukan penyampaian melalui seluruh media internal BHKLN terkait keaktifan dalam mengunggah pengetahuan di aplikasi Collaboration Office.

IK 18 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi

Dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, diperlukan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis, serta dianggap telah melaksanakan program-program RB secara baik. Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar penilaian terhadap manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Memperhatikan pentingnya pembangunan unit kerja yang memiliki predikat ZI tersebut, maka di lingkungan Setjen perlu dibangun minimal 1 unit kerja setiap tahun

yang telah memiliki predikat ZI. Hal ini juga sejalan dengan amanat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17/KEP-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Menindaklanjuti amanat tersebut, pada tanggal 9 Januari 2023 dilaksanakan DKO di lingkungan Setjen dengan salah satu hasilnya, yaitu bahwa Biro Perencanaan bersama dengan BHKLN pada tahun 2023 akan “dibangun” sebagai unit kerja menuju berpredikat WBK sebagai persiapan pada tahun 2024 untuk dilakukan penilaian kelayakan diberikan predikat WBK.

Penilaian atas unit kerja menuju WBK dilakukan oleh Tim Penilai Internal Setjen melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan indikator penilaian sebagai berikut:

1. Proses dengan bobot 60%, terdiri atas:
 - Manajemen perubahan (bobot 5%);
 - Penataan tata laksana (bobot 5%);
 - Penataan sistem manajemen SDM (bobot 15%)
 - Penguatan akuntabilitas (bobot 10%)
 - Penguatan pengawasan (bobot 15%); dan
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik (bobot 10%).
2. Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (bobot 20%).
3. Kualitas pelayanan publik (bobot 20%).

Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya layanan dokumen manajemen yang baik lingkup BHKLN												
IK 18 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi												
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	-	-	-	75	81,34	108,45%	-	-	-	-	-

Tabel 45 Rincian Capaian IK Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor: 118/SJ.2/TU.210/I/2024, Tanggal: 11 Januari 2024, Hal: Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI WBK WBBM di Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, BHKLN mendapatkan nilai capaian sebesar 81,34. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan IK baru di tahun 2023 sebagai amanat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Setjen tahun 2023 bahwa pembangunan unit kerja menuju ZI WBK/WBBM dilakukan di Biro Perencanaan dan BHKLN.

IK ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena tidak terdapat pada Renstra Setjen untuk BHKLN, namun hanya terdapat pada IK di level

Setjen, yaitu unit kerja berpredikat menuju WBK. Adapun capaian atas IK ini di lingkup Setjen dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

No.	Unit Kerja	Nilai
1.	Biro Perencanaan	82,70
2.	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	83,97
3.	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	81,34

Tabel 46 Capaian IK Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Setjen

Kegiatan pendukung pencapaian target IK ini, yaitu Kick-off Meeting BHKLN sebagai unit kerja yang akan dibangun menuju berpredikat WBK, penyusunan dokumen rancangan Surat Tugas Tim Kerja Pembangunan ZI di lingkungan BHKLN tahun 2023, penyusunan dokumen rancangan Kertas Kerja penetapan Tim Kerja Pembangunan ZI di lingkungan BHKLN tahun 2023, penyusunan dokumen Renja Pembangunan ZI di lingkungan BHKLN tahun 2023; dan melaksanakan persiapan pencanangan BHKLN sebagai unit kerja yang akan dibangun ZI tahun 2023. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh predikat WBK di tahun 2024 yaitu dengan melakukan “bedah LKE” sehingga diketahui area yang masih rendah di 2023 dan dilakukan upaya perbaikan di 2024.

IK 19 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan BHKLN

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Penerapan inovasi pelayanan publik dihitung berdasarkan gagasan/ide yang dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Gagasan/ide terkait inovasi pelayanan publik dituangkan ke dalam proposal sehingga dapat diikuti ke dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal KKP. Target hasil apabila proposal penerapan inovasi

pelayanan publik yang diusulkan, telah lolos seleksi dan ditetapkan oleh Tim Penilai Internal untuk mengikuti penilaian secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk itu, setiap tahunnya di lingkungan Setjen perlu diusulkan minimal 1 proposal untuk diikutkan pada KIPP. Hal ini juga sejalan dengan amanat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17/KEP-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Menindaklanjuti amanat tersebut, pada tanggal 9 Januari 2023 dilaksanakan DKO di lingkungan Setjen dengan salah satu hasilnya, yaitu bahwa BHKLN pada tahun 2023 ditargetkan untuk menyusun 1 proposal yang akan diikutkan pada KIPP. Setelah dilakukan pembahasan di internal BHKLN maka layanan yang akan diusulkan untuk diikutkan pada KIPP adalah Perpustakaan KKP.

Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya layanan dokumen manajemen yang baik lingkup BHKLN													
IK 19 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan BHKLN													
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Target 2024	
1	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	

Tabel 47 Capaian IK Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan BHKLN

Berdasarkan Memorandum Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor: 1339/SJ.7/TU.210/V/2023, Tanggal: 10 Mei 2023, Hal: Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023, BHKLN mewakili Setjen telah mengajukan 1 proposal. Capaian hanya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 karena pada saat itu BHKLN juga menjadi penanggung jawab IK ini dan telah menghasilkan 1 proposal.

IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena tidak terdapat pada Renstra Setjen untuk BHKLN, namun hanya terdapat pada IK di level Setjen, yaitu unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik. Adapun capaian atas IK ini di lingkup KKP dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

No	Eselon I	Jumlah Proposal yang disubmit	Target Nilai	Capaian Nilai Hasil	Persentase Capaian Berdasarkan Target
1.	SETJEN	1 Proposal	75	80.55	107.40
2.	DJPRL	1 Proposal	75	78.15	104.20
3.	DJPT	4 Proposal	75	87.40	116.53
4.	DJPB	2 Proposal	75	85.88	114.50
5.	DJPDSPKP	5 Proposal	75	79.79	106.39
6.	DJPSDKP	1 Proposal	75	81.55	108.73
7.	BRSDM	5 Proposal	75	81.52	108.69
8.	BKIPM	9 Proposal	75	83.78	111.70
9.	KKP	28 Proposal	75	82.33	109.77

Tabel 48 Capaian IK Inovasi Pelayanan Publik di Lingkup KKP

Faktor pendorong keberhasilan tercapainya IK ini, yaitu dengan telah disusunnya proposal dengan judul “Katalog Daring Archivelago Indonesia Marine Library dalam Mendukung Penguatan Literasi Kelautan dan Perikanan” dengan Kategori inovasi pelayanan publik adalah pemberdayaan masyarakat. Katalog Daring Archivelago Indonesia Marine Library memungkinkan setiap pengguna Perpustakaan KKP mengakses seluruh koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan dalam satu portal pencarian. Katalog Terintegrasi Archivelago juga telah terintegrasi dengan Indonesia Onesearch yaitu portal pencarian informasi dari perpustakaan, arsip, museum, dan pusat informasi dari seluruh Indonesia yang diinisiasi oleh Perpustakaan Nasional RI.

Katalog Daring Archivelago Indonesia Marine Library mengakomodasi fitur-fitur baru seperti:

- Tampilan lebih menarik (user friendly) sehingga Pemustaka dapat lebih mudah untuk melakukan pencarian koleksi melalui katalog daring;
- Pencarian spesifik dari subjek yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan;
- Daftar koleksi perpustakaan terbaru dan daftar koleksi populer sebagai bentuk promosi koleksi Perpustakaan KKP; serta
- anggota Perpustakaan teraktif berkesempatan untuk menjadi Pemustaka Terbaik dan Pemustaka Inspiratif yang berhak mendapatkan cinderamata Archivelago.

Dampak Katalog Daring Archivelago Indonesia Marine Library bagi Pemustaka adalah:

- Penelusuran koleksi perpustakaan menjadi lebih mudah karena terdapat 35 perpustakaan lingkup KKP yang telah terintegrasi dengan Katalog Terintegrasi Archivelago dan Indonesia Onesearch sehingga dapat diakses secara daring;
- Penelusuran koleksi Perpustakaan KKP dapat lebih cepat karena telah tersedia penelusuran spesifik, daftar koleksi terbaru, dan koleksi populer;
- Mendigitalisasi layanan dan mendidik pengguna perpustakaan untuk menggunakan teknologi yang lebih modern; dan
- Berkesempatan menjadi Pemustaka Inspiratif dan Pemustaka Terbaik Archivelago, yang diberikan berdasarkan jumlah kunjungan dan jumlah peminjaman/akses terhadap koleksi perpustakaan.

Telah disusun kelengkapan persyaratan untuk mengikuti kompetisi inovasi, yaitu:

- Surat pernyataan identitas inovator, Surat pernyataan implementasi inovasi dan Surat kesediaan replikasi inovasi;
- Proposal;
- Data dukung ringkasan;
- Data dukung latar belakang dan tujuan;
- Data dukung implementasi inovasi;
- Data dukung signifikansi;

- Data dukung sumber daya;
- Data dukung strategi keberlanjutan; dan
- Data dukung adaptabilitas.

Pada tahun 2024, BHKLN tidak menjadi penanggung jawab IK ini sehingga tidak dapat diberikan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian di tahun 2024.

3.2. Kinerja Anggaran

Pada tahun 2023 terdapat sebanyak dua kali refocusing anggaran di BHKLN sehingga anggaran yang semula sebesar Rp 36.235.315.000 menjadi Rp 24.281.262.000. Adapun realisasi anggaran BHKLN pada tahun 2023 sebesar Rp 24.125.714.981 atau sebesar 99,36% dari pagu anggaran setelah refocusing.

3.3. Kinerja Lainnya

Pada tahun 2023, BHKLN menerima beberapa penghargaan yang terdiri dari:



Top GPR Awards 2023
Prestasi dalam Membangun Digital Public Relations



Detikcom Awards
Kategori Tokoh Pengagas Ekonomi Biru



Indonesia Awards
Excellent Award for Strategic Initiative melalui
Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen



Juara 1 Stand Terbaik

Sail Teluk Cendrawasih Indonesia Maritime Expo and Forum di Kawasan Pantai Samau, Biak Numfor, Provinsi Papua



Piagam Penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas keaktifan melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori “Informatif” oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia.

3.4. Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

- Data capaian NKO BHKLN pada aplikasi Kinerjaku; dan
- Data alokasi anggaran dan realisasi anggaran BHKLN.

Unit Kerja	Nilai Kinerja Organisasi	Anggaran	Realisasi	%	% NPSP x Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1	2	3	4	5	6 = 2x3	7 = 6-4
Biro HKLN	106,13	24.281.262.000	24.125.714.981	99,36%	2.576.970.336.060	2.552.844.621.079
					% Efisiensi = 7/3	105,14

Tabel 49 Capaian Nilai Efisiensi BHKLN Tahun 2023

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya

merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan.

Efisiensi anggaran tersebut merupakan hasil optimalisasi pelaksanaan kegiatan di BHKLN melalui pemantauan dan koordinasi yang dilakukan secara berkala dan akuntabel serta komitmen bersama seluruh pegawai BHKLN untuk terus berbenah diri dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Selain itu, BHKLN senantiasa berupaya untuk berkolaborasi bersama dengan negara mitra/OI/K/L terkait dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan di BHKLN, misalnya melalui skema pembiayaan cost-sharing bersama APEC dalam penyelenggaraan 3 workshop APEC di Indonesia.

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penghitungan aplikasi kinerja, skor kinerja atau NKO BHKLN tahun 2023 adalah 106,13, turun dari NKO tahun 2022 sebesar 108,04. Namun demikian, dari 19 IK tanggung jawab BHKLN di tahun 2023, seluruh target IK telah tercapai dengan rincian sebagai berikut.

1. Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik, target 89,36 dan capaian sebesar 89,36 (persentase capaian 100%).
2. Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik, target 85,25 dan capaian sebesar 85,25 (persentase capaian 100%).
3. Nilai keterbukaan informasi publik, target 91 dan capaian sebesar 94,51 (persentase capaian 103,86).
4. Nilai komponen RB KKP yang menjadi tanggung BHKLN, target 3,7 dan capaian sebesar 3,92 (persentase capaian sebesar 105,95%).
5. Persentase efektivitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan, target 80 dan capaian sebesar 92,26 (persentase capaian sebesar 115,33%).
6. Nilai kepuasan terhadap layanan perpustakaan KKP, target 80 dan capaian sebesar 88,48 (persentase capaian sebesar 110,60%).
7. Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti, target 90 dan capaian sebesar 100 (persentase capaian sebesar 111,11%).
8. Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP, target 85 dan capaian sebesar 87,45 (persentase capaian sebesar 102,88%).
9. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional, target 92 dan capaian sebesar 100 (persentase capaian sebesar 108,70%).
10. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral bidang kelautan dan perikanan, target 92 dan capaian sebesar 100 (persentase capaian sebesar 108,70%).
11. Indeks profesionalitas ASN BHKLN, target 79 dan capaian sebesar 84,45 (persentase capaian sebesar 106,90%).
12. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BHKLN, target 100 dan capaian sebesar 100 (persentase capaian sebesar 100%).
13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BHKLN, target 75 dan capaian sebesar 75 (persentase capaian sebesar 100%).

14. Nilai penilaian mandiri SAKIP BHKLN, target 80,5 dan capaian sebesar 83,30 (persentase capaian sebesar 103,48%).
15. Persentase penyerapan anggaran BHKLN, target 95 dan capaian sebesar 99,55 (persentase capaian sebesar 104,79%).
16. Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri, target 100 dan capaian sebesar 100 (persentase capaian sebesar 100%).
17. Persentase unit kerja BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, target 92 dan capaian sebesar 133,33 (persentase capaian sebesar 120%).
18. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi, target 75 dan capaian sebesar 81,34 (persentase capaian sebesar 108,45%).
19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan BHKLN, target 1 dan capaian sebesar 1 (persentase capaian sebesar 100%).

4.2. Rekomendasi Perbaikan

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi 2023	Rekomendasi Perbaikan 2024
Sasaran Kegiatan 1 : Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik				
1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik	89,36	89,36	Target diusulkan 96,9
2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik	85,25	85,25	Target diusulkan 93,3
3	Nilai keterbukaan informasi publik	91	94,51	Target diusulkan 94 untuk mengantisipasi perubahan tematik LKE
4	Nilai komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab BHKLN	3,7	3,92	Tidak menjadi IK di 2024 karena RB tematik tidak per area (BHKLN menjadi PJ RB area manajemen perubahan)
5	Persentase efektivitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	80	92,26	Target diusulkan 89 karena pada saat validasi IK terdapat usulan perubahan responden
6	Nilai kepuasan terhadap layanan perpustakaan KKP	80	88,48	Target diusulkan 88
Sasaran Kegiatan 2 : Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kerja sama internasional				
7	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	90	100	Target diusulkan 95

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi 2023	Rekomendasi Perbaikan 2024
8	Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP	85	87,45	Target diusulkan 88
9	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	92	100	Target diusulkan 93
10	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral bidang kelautan dan perikanan	92	100	Target diusulkan 100
Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BHKLN				
11	Indeks profesionalitas ASN BHKLN	79	84,45	Target dari PJ IK KKP 84
12	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BHKLN	100	100	Target dari PJ IK KKP 100
13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BHKLN	75	75	Target dari PJ IK KKP 100
14	Nilai penilaian mandiri SAKIP BHKLN	80,5	83,30	Target dari PJ IK KKP 84
15	Persentase penyerapan anggaran BHKLN	95	99,55	Target dari PJ IK KKP 95
16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100	100	Target dari PJ IK KKP 100
17	Persentase unit kerja BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	92	133,33	Target dari PJ IK KKP 94
18	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	75	81,34	Perubahan nomenklatur IK. BHKLN menjadi unit kerja yang ditargetkan memperoleh predikat WBK
19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan BHKLN	1	1	Tidak menjadi IK BHKLN karena PJ IKK ini oleh unit kerja lain lingkup Setjen

Tabel 50 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Tahun 2024

LAMPIRAN